

RENCANA STRATEGIS

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

TAHUN 2020-2024



PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari Renstra Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan pembangunan Nasional.

Renstra PPN Ternate merupakan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pengelolaan perikanan tangkap yang berisikan tentang arah kebijakan dan strategis pengelolaan PPN Ternate tahun 2020-2024 dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan perikanan tangkap.

Dalam pelaksanaan Renstra PPN Ternate tahun 2020-2024, diperlukan dukungan dan sinergi antara jajaran pimpinan dan seluruh staf PPN Ternate, sehingga keberhasilan dalam pelaksanaannya dapat terwujud dengan optimal. Apabila diperlukan Renstra ini dapat dilakukan revisi sesuai dengan kebijakan strategis dan indikator-indikator dalam mendukung pelaksanaannya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan dan sumbangsih pemikiran sehingga menghasilkan dokumen Renstra ini. Semoga Renstra PPN Ternate tahun 2020-2024 dapat mewakili rencana kegiatan yang mendukung program pengelolaan perikanan tangkap yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan serta dapat mewujudkan “Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”.

Ternate, Juni 2020

Kepala PPNTernate,

ttd

Kamarudin

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi Dan Permasalahan	3
1.3. Lingkungan Strategis	8
BAB 2. VISI, MISI, DAN TUJUAN	10
2.1. Pembangunan Kelautan dan Perikanan	10
2.2. Pembangunan Perikanan Tangkap.....	11
2.3. Pembangunan PPN Ternate	15
BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	19
3.1 Arah dan Kebijakan Strategis Pembangunan Kelautan dan Perikanan	19
3.2 Arah dan Kebijakan Strategis Pembangunan Perikanan Tangkap	26
3.3 Arah dan Kebijakan Strategis Pembangunan PPN Ternate	48
BAB 4. INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	52
4.1 Target Kinerja	52
4.2 Kerangka Pendanaan	54
BAB 5. PENUTUP	55
LAMPIRAN.....	56
Lampiran 1 Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian/Lembaga.....	56
Lampiran 2 Matriks Kerangka Regulasi	58

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan di WWPNRI 715.....	4
Tabel 2. Fasilitas Pokok, Fungsional dan Penunjang PPN Ternate	4
Tabel 3. Matriks SWOT Kegiatan di PPN Ternate	8
Tabel 4. Indikator Kinerja Program Pengelolaan Perikanan Tangkap di PPN Ternate	52
Tabel 5. Indikator Kinerja Kegiatan di PPN Ternate.....	54

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Capaian Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di PPN Ternate Tahun 2015-2019... 2	2
Gambar 2. Capaian Nilai Produksi di PPN Ternate Tahun 2015-2019	2
Gambar 3. Capaian Nilai PNBPN di PPN Ternate Tahun 2015-2019.....	3
Gambar 4. Implementasi Pendekatan Supply - Demand terhadap Manajemen Perikanan Tangkap	29
Gambar 5. Pendekatan Perencanaan Strategis Sub Sektor Perikanan Tangkap, Arah Kebijakan Utama, Serta Kegiatan Prioritas Tahun 2020-2024	30
Gambar 6. Pemetaan Dukungan Stakeholder Potensial terhadap Pembangunan Perikanan Tangkap	39
Gambar 7. Bagan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.....	48
Gambar 8. Struktur Organisasi PPN Ternate	51

BAB 1. PENDAHULUAN

Penyusunan Rencana Strategis PPN Ternate tahun 2020-2024, merupakan bentuk pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, secara substansi mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis PPN Ternate, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan kegiatan di PPN Ternate selama tahun 2020-2024. Dokumen ini menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pengelolaan perikanan tangkap.

Berbagai upaya akselerasi pembangunan perikanan tangkap selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, peningkatan penyerapan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan, serta konsumsi ikan masyarakat, yang pada akhirnya akan memperkuat struktur ekonomi yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.

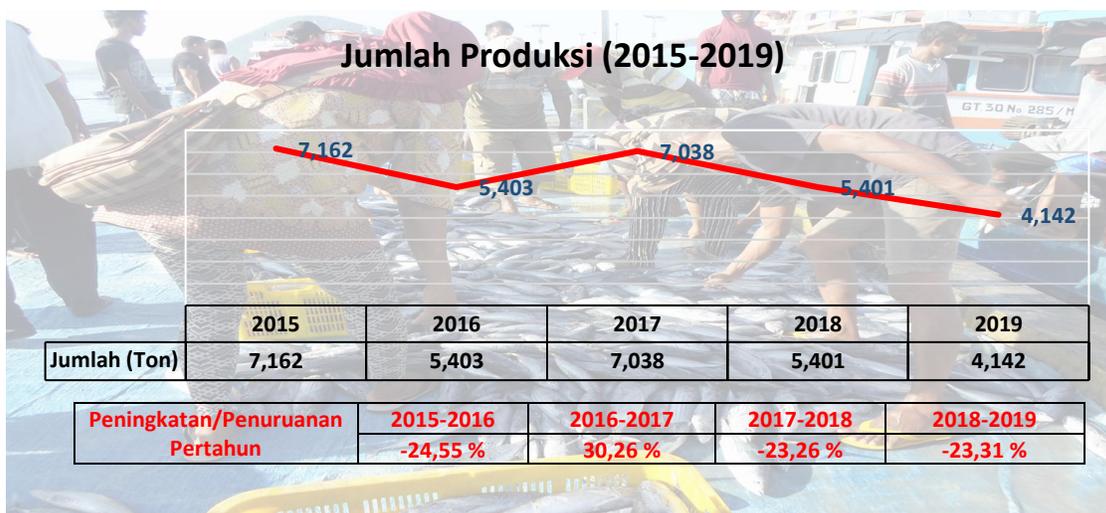
1.1. Kondisi Umum

PPN Ternate sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, memberikan kontribusi terhadap pencapaian pembangunan perikanan tangkap tahun 2015-2019, melalui pencapaian sasaran strategis terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan yang direpresentasikan melalui pencapaian indikator kinerja utama, serta dukungan pelaksanaan kegiatan yaitu sebagai berikut:

▪ Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di PPNTernate

Realisasi rata-rata pertahun jumlah produksi perikanan tangkap di PPN Ternate berfluktuasi dari tahun 2015-2019. Produksi perikanan tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate tahun 2015-2019 rata – rata sebesar 5.829 ton per tahun dari total Produksi selama 5 (lima) tahun sebesar 29.146 Ton. Volume produksi terbesar pada tahun 2015 sebesar 7.162 ton

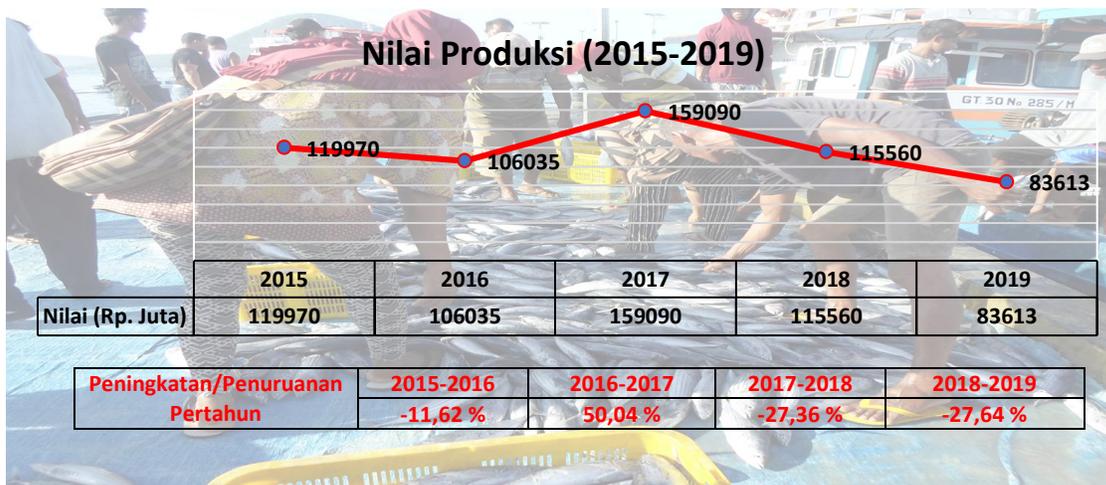
sedangkan pada tahun 2019 Produksi Perikanan Tangkap di PPN Ternate menurun 4.142 ton. Terjadi Penurunan Produksi selama 5 (lima) tahun terakhir dengan penurunan sebesar 0.75 – 1.30%. Adapun data capaian pertahun disajikan pada grafik berikut:



Gambar 1. Capaian Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di PPN Ternate Tahun 2015-2019

▪ **Nilai Produksi Perikanan Tangkap di PPN Ternate**

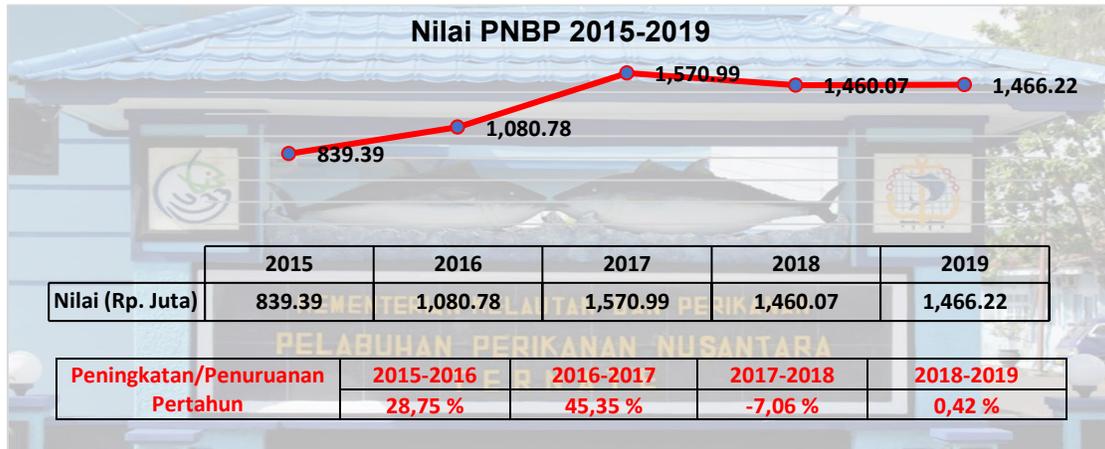
Capaian nilai produksi perikanan tangkap di PPN Ternate tahun 2015-2019 berbanding lurus dengan jumlah produksi perikanan tangkap yaitu mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun ke tahun. Nilai Produksi Perikanan Tangkap PPN Ternate cenderung menurun pada tahun 2019 sebesar Rp. 83.612.142 selama 5 (lima) tahun terakhir (2015 – 2019). Nilai Produksi tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar Rp. 159.090.424 atau kenaikan sebesar 42.45.1424 / 1.36 % dari target sebesar Rp. 116.639.000 sebagaimana disajikan dalam grafik berikut:



Gambar 2. Capaian Nilai Produksi di PPN Ternate Tahun 2015-2019

- **Nilai PNBP di PPN Ternate**

Realisasi rata-rata nilai PNBP di PPN Ternate tahun 2015-2019 mengalami peningkatan, capaian tertinggi diperoleh pada tahun 2017 sebesar 1,570 Milyar atau meningkat 45,35% dari tahun 2016, namun pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 7,06% dan capaian mengalami peningkatan ditahun 2019 sebesar 0,42%



Gambar 3. Capaian Nilai PNBP di PPN Ternate Tahun 2015-2019

1.2. Potensi Dan Permasalahan

Potensi pengembangan perikanan tangkap yang dimiliki PPN Ternate mencakup beberapa kekuatan dalam sistem perikanan tangkap maupun berbagai peluang yang dapat diarahkan untuk mengembangkan sistem perikanan tangkap secara optimal dan berkelanjutan, potensi tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

- **Potensi Sumberdaya Ikan**, PPN Ternate memiliki sumberdaya ikan yang cukup besar yang diperoleh dari Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 715 meliputi wilayah perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, laut seram dan Teluk Berau. Secara keseluruhan potensi yang dimiliki sebesar 631,703 ton. Secara lengkap data potensi sumberdaya ikan di WPP 715 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan di WWPNI 715

Kelompok SDI	WPPNI 715		
	Potensi (Ton)	JTB (Ton)	Tingkat Pemanfaatan
Ikan Pelagis Kecil	378,734	302,987	1.05
Ikan Pelagis Besar	51,394	41,115	1.58
Ikan Demersal	114,005	91,204	0.51
Ikan Karang	69,975	55,980	0.49
Udang Peneid	6,089	4,871	1.21
Lobster	710	568	1.23
Kepiting	490	392	1.81
Rajungan	643	515	1.20
Cumi-cumi	9,66	7,731	1.80
JUMLAH	631,703		

Sumber: Kepmen Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 Tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Dipebolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Berdasarkan data estimasi, potensi dan tingkat pemanfaatan berdasarkan Kepmen KP Nomor 47 tahun 2016 dan jika dilihat dari data jumlah produksi perikanan tangkap di PPN Ternate selama tahun 2015-2019, masih perlu adanya peningkatan jumlah upaya penangkapan di PPN Ternate.

- **Potensi Sarana dan Prasarana,** PPN Ternate telah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang menunjang usaha perikanan tangkap sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Fasilitas Pokok, Fungsional dan Penunjang PPN Ternate

No	Fasilitas Pokok	Volume	Kondisi
1	Lahan I	40.000 m ²	Termanfaatkan
2	Lahan II	60,606 m ²	Termanfaatkan
3	Lahan Sumur Bor	1.027 m ²	Baik
4	Dermaga I	154 m	Baik
5	Dermaga II	133 m	Baik
6	Talud I Selatan	197 m	Baik
7	Talud II Utara	300 m	Baik
8	Jalan Komplek	2.834 m	Baik
9	Pagar Keliling Lahan I (Beton)	500 m	Baik

10	Pagar Keliling Lahan II (Beton)	450 m	Baik
11	Pagar Keliling Sumur Bor (BRC)	153,57 m	Baik
No	Fasilitas Fungsional	Volume	Kondisi
1	Kantor Utama	416 m ²	Baik
2	Pos Jaga I	45 m ²	Baik
3	Pos Jaga II	22,75 m ²	Baik
4	TPI I	416 m ²	Baik
5	TPI II	288 m ²	Baik
6	TPI Higienis	340 m ²	Baik
7	Pelayanan Satu Atap	400 m ²	Baik
8	Balai Pertemuan Nelayan	100 m ²	Baik
9	Bengkel	200 m ²	Baik
10	Pabrik Es Balok	10 Ton	Baik
11	Cold Storage	100 Ton	Baik
12	Cold Storage	60 Ton	Baik
13	Cold Storage	20 Ton	Baik
14	Air Blast Frezer I	3 Ton	Rusak
15	Air Blast Frezer II	4 Ton	Rusak
16	Air Blast Frezer III	2,5 Ton	Baik
17	Air Blast Frezer IV	4 Ton	Baik
18	MCK Umum	54 m ²	Baik
19	Daya Listrik I	147 KVA	Baik
20	Daya Listrik II	33 KVA	Baik
21	Tangki Air	50 Ton	Baik
22	Tangki Air	100 Ton	Baik
23	Tangki BBM	50 Ton	Baik
24	Tangki BBM	15 Ton	Baik
25	Area Parkir	544 m ²	Baik
26	Mini Plant	378 m ²	Baik
27	Pos Tambat Labuh	64 m ²	Baik
28	Rumah Genset I	40,15 m ²	Baik
29	Rumah Genset II	10,3 m ²	Baik
30	Rumah Genset III	26 m ²	Baik
31	Tempat Penumpukan Cool Box	48 m ²	Baik

32	Depot Es	22,5 m2	Baik
33	Gudang Penyimpanan Arsip	28 m2	Baik
34	Gudang Penampungan Ikan	119 m2	Baik
35	Sumur Bor (1 Titik)	32 m2	Baik
36	Penjemuran Jaring	500 m2	Baik
37	Genset I	150 KVA	Baik
38	Genset II	200 KVA	Baik
39	Genset III	130 KVA	Baik
40	Genset IV	40 KVA	Baik
41	Gudang Peralatan	90 m2	Baik
No	Fasilitas Penunjang	Volume	Kondisi
1	Rumah Dinas Kepala	120 m2	Baik
2	Rumah Dinas Jabatan (3 Unit)	70 m2	Baik
3	Mess Operator (10 Unit)	36 m2	Baik
4	Guest House	120 m2	Baik
5	Musholla	100 m2	Baik
6	Garasi	3 Unit	Baik
7	Gudang K5	48 m2	Baik
8	Tempat Sampah Sementara	12,9 m2	Baik
9	Kios	28 m2	Baik
10	Kendaraan Truck Roda 6	3 Unit	Baik
11	Kendaraan Berrefrigerasi Roda 6	1 Unit	Baik
12	Kendaraan Berinsulasi Roda 4	1 Unit	Baik
13	Kendaraan Dinas Roda 2	17 Unit	Baik
14	Kantor Pegadaian	42 m2	Baik
15	Gapura	33 m2	Baik
16	Forklip	2 Unit	Baik
17	Kendaraan Dinas Roda 4	6 Unit	Baik
18	Kendaraan Dinas Roda 3	3 Unit	Baik

➤ **Potensi Pelayanan dan Pengembangan Usaha**, dalam mendukung usaha perikanan tangkap PPN Ternate telah menyediakan pelayanan kepada masyarakat perikanan berupa pelayanan-pelayanan:

- **Seksi Kesyahbandaran** ; pelayanan tambat labuh kapal perikanan, pelayanan SPB, pelayanan SHTI, pemberian rekomendasi BBM

- **Seksi Operasional Pelabuhan;** penyediaan data perikanan tangkap, pembinaan mutu hasil perikanan, publikasi dan dokumentasi kegiatan usaha perikanan tangkap
- **Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha;** pelayanan sewa lahan dan bangunan, pelayanan sewa peralatan dan mesin, pelayanan cold storage dan ABF, penyediaan dan penyaluran es dan air, pelayanan perbengkelan, serta pelayanan pas masuk pelabuhan.
- **Sub Bagian Tata Usaha;** pelayanan masyarakat perikanan, pelayanan keamanan dan kebersihan pelabuhan.

Permasalahan dalam mendukung program pengembangan perikanan tangkap yang dihadapi PPN Ternate mencakup berbagai aspek baik itu internal maupun eksternal. Permasalahan tersebut dikelompokkan dalam 3 (tiga) permasalahan utama yaitu:

- **Kapasitas Nelayan,** mencakup beberapa permasalahan yaitu:
 - Rendahnya pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan standar sertifikasi awak kapal perikanan dan cara penanganan ikan yang baik;
 - Masih rendahnya pemahaman dalam penggunaan aplikasi pelaporan e-logbook bagi awak kapal dan nahkoda kapal perikanan;
 - Masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan nelayan maupun pelaku Usaha tentang pentingnya Perjanjian Kerja Laut;
 - Rendahnya kesadaran nelayan akan pentingnya asuransi BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan.
- **Kelembagaan Usaha Perikanan,** antara lain :
 - Masih rendahnya pengetahuan pengusaha perikanan tentang prosedur perizinan melalui aplikasi SILAT;
 - Struktur kelembagaan usaha perikanan belum tersusun dengan baik.
- **Sarana dan Prasarana usaha penangkapan ikan,** antara lain:
 - Belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur Dermaga II dan kolam pelabuhan (wilayah kerja perairan) sebagai tempat berlabuh kapal perikanan karena masih ada kapal Non Perikanan yang melakukan tambat labuh;
 - Terjadinya pendangkalan pada kolam Dermaga I PPN Ternate sehingga tidak dapat melakukan aktivitas pembongkaran di TPI Higienis saat air surut.
 - Terdapat beberapa fasilitas yang mengalami penurunan kapasitas fungsional/produksi terutama peralatan dan mesin.
- **Kapasitas SDM pelaksana pelayanan;** masih rendah kualitas dan kuantitas SDM yang dimiliki PPN Ternate.

1.3. Lingkungan Strategis

Pelaksanaan operasional di PPN Ternate dalam mendukung program perikanan tangkap sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan strategis yang dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Dengan demikian potensi dan permasalahan yang telah teridentifikasi pada bagian sebelumnya akan dielaborasi pada konteks lingkungan strategis internal maupun eksternal, untuk selanjutnya sekaligus dianalisis berbagai alternatif dasar arah kebijakannya.

Secara khusus, proses identifikasi akan ditelaah sampai pada lingkup kegiatan. Metode SWOT akan digunakan sebagai dasar analisis agar proses telaah dapat dielaborasikan ke dalam lingkungan strategis, sekaligus untuk mempermudah permusan alternatif arah kebijakan.

Tabel 3. Matriks SWOT Kegiatan di PPN Ternate

	STRENGTH (S)	WEAKNESS (W)
SWOT	Faktor Kekuatan Internal : Lahan industri ± 6 Ha Lokasi strategis (pusat kota Ternate) Daya listrik tersedia 2 MW	Faktor Kelemahan Internal SDM kurang Kapasitas dan produktivitas fasilitas menurun Alokasi anggaran terbatas
OPPORTUNITIES (O)	STRATEGI (SO)	STRATEGI (WO)
Faktor Peluang eksternal : Status pemanfaatan SDI masih hijau Peluang usaha perikanan tinggi	Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang : Sosialisasi dan promosi peluang usaha Penataan zonasi pemanfaatan dermaga	Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang : Peningkatan kualitas SDM dan usulan formasi CPNS Mengusulkan rehab fasilitas
THREAT (T)	STRATEGI (ST)	STRATEGI (WT)
Faktor ancaman eksternal : Kecenderungan pelaku usaha mengekspor bahan baku	Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman : sosialisasi dan promosi usaha khususnya usaha pengolahan dan penambahan nilai tambah hasil perikanan	Strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari kelemahan : Pengaturan tugas SDM sesuai kompetensi

<p>Adanya pelabuhan tangkahan yang mengakomodir kegiatan pembongkaran ikan</p>	<p>berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menertibkan kapal-kapal perikanan agar memanfaatkan pelabuhan pangkalan sesuai dengan dokumen (SIPI/SIKPI)</p>	<p>perbaikan dan penataan penggunaan fasilitas sesuai aturan dan prosedur yang telah ditetapkan</p>
--	---	---

BAB 2. **VISI, MISI, DAN TUJUAN**

2.1. Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Visi KKP 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”.

Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP menjalankan 4 (empat) dari 9 (sembilan) Misi Presiden yaitu:

Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

- Peningkatan Daya Saing SDM KP
- Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan

Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

- Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional

Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

- Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

- Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Tujuan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Menjabarkan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

1. **Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan**, yakni:
 - a. Mengembangkan kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan Perikanan
 - b. Mengembangkan inovasi dan riset kelautan dan perikanan

2. **Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional**, yakni:
 - a. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya dan perikanan tangkap
 - b. Meningkatkan mutu, daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan
3. **Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**, yakni:
 - a. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati, serta
 - b. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
 - c. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.
4. **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP**, yakni:
 - a. Meningkatkan kinerja Reformasi Birokrasi KKP

2.2. Pembangunan Perikanan Tangkap

Visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Visi Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Mandiri dan Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”.

Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Ditjen Perikanan Tangkap melaksanakan 4 (empat) Misi Presiden, dengan uraian sebagai berikut:

Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

- Penumbuhan Kewirausahaan Masyarakat Perikanan Tangkap
- Penguatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan Tangkap Perempuan

Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

- Peningkatan Nilai Tambah dari Pemanfaatan Infrastruktur Perikanan Tangkap
- Melanjutkan Revitalisasi Industri Perikanan Tangkap dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0

Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

- Mitigasi Perubahan Iklim terhadap Ekosistem Sumber Daya Perikanan
- Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup Sumber Daya Perikanan

Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

- Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Tangkap

Tujuan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka tujuan pembangunan pembangunan perikanan tangkap adalah :

1. **Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap**, yaitu peningkatan pemahaman, kapasitas, serta inisiatif inovasi masyarakat perikanan tangkap; dilakukan melalui pendampingan/fasilitasi usaha, diversifikasi usaha, pemberdayaan/perindungan masyarakat perikanan tangkap, serta pengarusutamaan gender.
2. **Membangun Struktur Ekonomi Perikanan Tangkap Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing**, yaitu pembangunan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing pada sub bidang perikanan tangkap, melalui pengelolaan sumber daya perikanan berbasis industrialisasi; peningkatan produktivitas sarana prasarana penangkapan, peningkatan kualitas ikan hasil tangkapan, serta implementasi keterpaduan sistem logistik ikan di pelabuhan perikanan.
3. **Mencapai Lingkungan Hidup Sumber Daya Perikanan Yang Berkelanjutan**, yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup pada sub bidang perikanan tangkap yang mencakup pengelolaan perikanan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP); penerapan harvest strategy, alokasi izin usaha berbasis alokasi sumber daya ikan, penggunaan sarana prasarana penangkapan ramah lingkungan, serta implementasi konsep eco-infrastructure.
4. **Mewujudkan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya di Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap**, yaitu upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi DJPT yang berkualitas, mencakup penataan kerangka kebijakan, profesionalisme ASN, keterbukaan perencanaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui implementasi komunikasi berbasis sistem informasi 4.0.

Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Sasaran program pembangunan perikanan tangkap merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh DJPT sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran program DJPT 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Kesejahteraan nelayan meningkat, dengan indikator kinerja:
 - a. Nilai Tukar Nelayan (NTN);
 - b. Rata-rata pendapatan nelayan/bulan (Rp.Juta/nelayan/bulan).
2. Sumber daya perikanan tangkap berkelanjutan, dengan indikator kinerja:
 - a. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (persen), dengan indikator output :
 - Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan (unit);
 - Jumlah hari layar pemantauan oleh observer di atas kapal perikanan (hari layar);
 - Jumlah WPP yang dievaluasi dan dihitung alokasi sumber daya ikannya (WPP).
3. Pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap sesuai ketentuan, dengan indikator kinerja:
 - a. Nilai PNBP Ditjen Perikanan Tangkap (Rp.Miliar), dengan indikator output:
 - Nilai PNBP SDA Ditjen Perikanan tangkap (Rp.Miliar);
 - Nilai PNBP Pelabuhan Perikanan/BBPI (Rp.Miliar)
4. Tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab, dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase pengelolaan sumber daya ikan di perairan darat dan WPPNRI (persen), dengan indikator output:
 - Jumlah laut ZEEI yang terkelola sumber daya ikannya (WPP);
 - Tingkat pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan (persen);
 - Jumlah lembaga pengelola perikanan wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional (WPP);
 - Jumlah sumber daya ikan perairan darat yang terkelola sumber daya ikannya (lokasi).
5. Produksi perikanan tangkap meningkat, dengan indikator kinerja:
 - a. Jumlah produksi perikanan tangkap (juta ton);
 - b. Nilai produksi perikanan tangkap (Rp. Triliun);
 - c. Persentase dukungan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap (persen), dengan indikator output:
 - Jumlah Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera, Nusantara, Pantai dan Pangkalan Pendaratan Ikan (lokasi);
 - Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Samudera, Nusantara, Pantai dan Pangkalan Pendaratan Ikan (persen);
 - Jumlah kapal perikanan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap dan laik simpan (unit);

- Jumlah kapal yang terdaftar sebagai kapal perikanan (unit);
- Jumlah kapal perikanan bantuan yang terbangun (unit);
- Jumlah persetujuan pengadaan kapal perikanan yang diterbitkan (unit);
- Jumlah rekomendasi teknis, rancangan teknis Standar Nasional Indonesia, sertifikasi dan kerjasama pemanfaatan teknologi penangkapan ikan (dokumen);
- Jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terkelola sesuai rancangan teknis dan memenuhi standar (unit);
- Jumlah alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang terbangun (unit);
- Jumlah perjanjian kerja laut (PKL) yang diterapkan (orang);
- Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi berdasarkan keahlian dan keterampilan (orang);
- Jumlah kapal perikanan yang dihitung produktivitasnya (unit);
- Jumlah kapal perikanan bantuan yang dipantau operasionalnya, jumlah pemantauan dan standarisasi permesinan kapal yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan (provinsi);
- Jumlah alokasi izin yang diterbitkan (unit);
- Jumlah realisasi kapal terhadap alokasi perizinan sesuai SIUP (SIPI/SIKPI) (unit);
- Jumlah provinsi yang mengintegrasikan sistem perizinan pusat-daerah (provinsi);
- Jumlah nelayan yang terlindungi (orang);
- Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap (nelayan);
- Jumlah fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan (bidang);
- Jumlah Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya (kelompok) (kumulatif);
- Jumlah keluarga nelayan yang difasilitasi diversifikasi usahanya (RTP);
- Jumlah fasilitasi kawasan sentra/kampung nelayan yang tertata (lokasi);
- Jumlah kampung nelayan maju yang tertata dan terintegrasi.

6. Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap yang baik, dengan indikator kinerja yaitu:

a. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Tangkap (nilai), dengan indikator kinerja pendukung:

- Persentase pelaksanaan dukungan manajemen Satker lingkup Ditjen Perikanan Tangkap;
- Maturitas SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (level);
- Indeks Efektivitas Kebijakan Ditjen Perikanan Tangkap (Indeks);
- Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap (indeks);

- Nilai SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai);
- Nilai PMPRB UPT Pelabuhan Perikanan.
- b. Unit berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (satker);
- c. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen);
- d. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar lingkup DJPT (persen);
- e. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai);
- f. Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK DJPT dibandingkan realisasi anggaran DJPT TA.2019 (persen).

2.3. Pembangunan PPN Ternate

Visi Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Visi PPN Ternate tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Mandiri dan Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”.

Misi Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

PPN Ternate melaksanakan 4 (empat) Misi Presiden, dengan uraian sebagai berikut :

Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

- Peningkatan kapasitas dan keterampilan nelayan dalam pelaksanaan penanganan hasil tangkapan dalam rangka peningkatan mutu produksi perikanan tangkap;
- Meningkatkan kapasitas SDM Nelayan terkait ilmu dan keterampilan kepelautan melalui pelatihan-pelatihan;
- Peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas pelayanan.

Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

- Penyebaran informasi dan fasilitas pemanfaatan kredit usaha nelayan;
- Peningkatan Pemanfaatan lahan industri perikanan;
- Peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan pendukung usaha perikanan tangkap.

Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

- Penataan kawasan pelabuhan perikanan dalam mendukung usaha perikanan tangkap
- Pemantauan wilayah pengelolaan perikanan tangkap (WPP)
- Peningkatan fungsi kesyahbandaran dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan kapal perikanan dalam memanfaatkan sumber daya ikan sesuai aturan dan izin yang di berikan
- Pengembangan kawasan pelabuhan perikanan dalam mendukung wisata bahari

Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

- Pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM
- Pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan

Tujuan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Menjabarkan misi PPN Ternate, maka tujuan pembangunan pembangunan perikanan tangkap adalah :

1. **Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap**, yaitu melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan nelayan terutama dalam melakukan penanganan ikan yang baik (pelatihan BST, ANKAPIN, dan Pelatihan SKPI Tingkat I), penggunaan aplikasi/pelaporan online (*e-logbook* penangkapan ikan), dan fasilitasi pelaku usaha dalam mengakses informasi perizinan.
2. **Membangun Struktur Ekonomi Perikanan Tangkap Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing**, pembinaan kelembagaan usaha perikanan tangkap, penyediaan fasilitas pojok pendanaan nelayan, memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dalam berinvestasi di lahan industri dalam kawasan pelabuhan, dan peningkatan fasilitas pelabuhan pendukung usaha perikanan tangkap.
3. **Mencapai Lingkungan Hidup Sumber Daya Perikanan Yang Berkelanjutan**, yaitu mendukung peningkatan kualitas lingkungan dengan pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), pengelolaan perikanan tangkap melalui penyediaan data dan informasi terkait sumberdaya perikanan WPP 715, optimalisasi fungsi kesyahbandaran dalam pelaksanaan verifikasi kesesuaian dokumen perizinan dengan fisik kapal dan alat penangkapan ikan, penataan lingkungan pelabuhan yang bersih dan nyaman sebagai upaya peningkatan daya

tarik wisata bahari di pelabuhan perikanan.

4. **Mewujudkan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya di Lingkup PPN Ternate**, yaitu upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi di PPN Ternate yang berkualitas, mencakup penataan kerangka kebijakan, profesionalisme ASN, keterbukaan perencanaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta pelayanan prima.

Sasaran Strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Sasaran program pembangunan perikanan tangkap merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh PPN Ternate sebagai suatu masukan/input dari beberapa program yang dilaksanakan oleh Ditjen Perikanan Tangkap. Sasaran kegiatan PPN Ternate 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap yang partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan, dengan indikator kinerja:
 - a) Jumlah produksi perikanan tangkap di PPN Ternate (Ton);
 - b) Nilai produksi perikanan tangkap di PPN Ternate (Ton);
 - c) Nilai PNBP di PPN Ternate (Rp. Juta)
2. Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan perikanan tangkap di pelabuhan perikanan yang adil berdaya saing, dan berkelanjutan, dengan indikator kinerja:
 - a) Persentase pelaksanaan rencana aksi pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan (persen);
 - b) Jumlah lembaga pengelola perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional (WPP);
 - c) Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan (unit);
 - d) Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (persen);
 - e) Jumlah perjanjian kerja laut (PKL) yang diterapkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (orang);
 - f) Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi berdasarkan keahlian dan keterampilan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (orang);
 - g) Permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (lokasi);
 - h) Persentase Penyampaian informasi perizinan pusat – daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (%);
 - i) Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (nelayan).

3. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate yang kompeten, professional dan berintegritas, dengan indikator kinerja:
 - a) Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Indeks)
4. Terwujudnya birokrasi lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima, dengan indikator kinerja:
 - a) Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (%);
 - b) Persentase pemenuhan dokumen AKIP lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (%);
 - c) Persentase pemenuhan dokumen Maturitas SPIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (%).
5. Terkelolanya anggaran pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate secara efisien dan akuntabel, dengan indikator kinerja:
 - a) Nilai kinerja anggaran lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (nilai).

BAB 3.

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah dan Kebijakan Strategis Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2020-2024 disusun berdasarkan Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan. Arah dan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan disusun untuk menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut:

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan izin, pengembangan pelabuhan, penangkapan ikan sampai dengan ZEE dan laut lepas, peningkatan pendapatan melalui akses permodalan, perlindungan dan perbaikan hidup nelayan. (DJPT)
2. Mengoptimalkan dan memperkuat perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan protein dan nilai tambah melalui akses permodalan, dan perlindungan usaha budidaya. (DJPB)
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk, penguatan sistem karantina ikan, peningkatan nilai tambah untuk peningkatan devisa. (DJPDS, BKIPM)
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait. (DJPRL, DJPSDKP dan BKIPM)
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan. (BRSDM)

Untuk mencapai 5 arah kebijakan di atas, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan kebijakan tatakelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di pusat dan daerah. Strategi pelaksanaan arah kebijakan di atas sebagai berikut:

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan izin, pengembangan pelabuhan, penangkapan ikan sampai dengan ZEE dan laut lepas, peningkatan pendapatan melalui akses permodalan, perlindungan dan perbaikan hidup nelayan. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
 - a. Optimalisasi produktivitas sarana prasarana perikanan tangkap dengan kegiatan utama meliputi:

- 1) Pengembangan armada perikanan, alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan yang ramah lingkungan;
 - 2) Penguatan Unit Pelaksana Teknis perikanan tangkap.
- b. Penyediaan infrastruktur perikanan tangkap yang terintegrasi dengan kegiatan utama meliputi:
- 1) Pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah, pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan, dan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan pasar ikan bertaraf internasional (*Major Project*) dengan berkoordinasi dengan K/L terkait, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha.
 - 2) Penguatan Unit Pelaksana Teknis perikanan tangkap; dan
 - 3) Pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT).
- c. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dengan kegiatan utama meliputi:
- 1) Eksplorasi perikanan di ZEE dan laut lepas;
 - 2) Pengembangan lembaga pengelola WPP dan penguatan data stok sumberdaya ikan;
 - 3) Pengelolaan perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD); dan
 - 4) Partisipasi dalam organisasi pengelolaan perikanan regional yang melingkupi perairan indonesia (RFMOs).
- d. Reformasi instrumen perizinan untuk keberlanjutan sumber daya ikan dan usaha perikanan tangkap dengan kegiatan utama meliputi: perbaikan, penataan, dan penyederhanaan perizinan usaha di pusat dan daerah, termasuk sinergi dengan instansi lain yang terkait.
- e. Pemberdayaan usaha dan perlindungan nelayan dengan kegiatan utama meliputi:
- 1) Fasilitasi dan pengembangan skema pembiayaan yang murah dan mudah diakses, optimalisasi peran LPMUKP;
 - 2) Peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan nelayan, pemberdayaan kelompok nelayan perempuan, perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil, penguatan kelembagaan nelayan, dan penguatan kelompok usaha bersana melalui pembentukan korporasi nelayan (*Major Project*) berkoordinasi dengan kementerian Koperasi dan UKM dan pemerintah daerah;
 - 3) Pengembangan kampung nelayan maju, bantuan premi asuransi nelayan, perluasan skema asuransi mandiri, sertifikasi tanah nelayan; dan
 - 4) Pengaturan akses nelayan terhadap pengelolaan sumberdaya, kemudahan fasilitasi

usaha dan investasi, dan pengembangan perikanan berbasis digital.

2. Perikanan budidaya dioptimalkan dan diperkuat untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan protein dan nilai tambah melalui akses permodalan, dan perlindungan usaha budidaya. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
 - a. Optimalisasi perikanan budidaya air payau melalui major project “Revitalisasi tambak dikawasan sentra produksi udang dan bandeng” berkoordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah dan badan usaha.
 - b. Pengembangan perikanan budidaya air Laut
 - c. Pengembangan perikanan budidaya air Tawar
 - d. Pengembangan budidaya ikan hias
 - e. Pengembangan budidaya rumput laut
 - f. Pengembangan pakan mandiri
 - g. Penataan perizinan usaha budidaya pusat dan daerah (Provinsi)
 - h. Pembangunan fasilitas perbenihan
 - i. Pengelolaan kluster kawasan budidaya berkelanjutan
 - j. Produksi induk unggul dan benih bermutu
 - k. Pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor
 - l. Sertifikasi cara budidaya Ikan yang Baik (CBIB), cara perbenihan ikan yang baik (CPIB), dan cara pembuatan pakan ikan yang baik (CPPIB)
 - m. Sarana dan prasarana percontohan produksi serta usaha perikanan budidaya
 - n. Pembangunan infrastruktur perikanan budidaya antara lain meliputi saluran irigasi tambak dan keramba jaring apung
 - o. Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)
 - p. Sertifikasi lahan dan asuransi usaha perikanan budidaya
 - q. Penguatan UPT perikanan budidaya
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk, penguatan sistem karantina ikan, peningkatan nilai tambah untuk peningkatan devisa. Startegi yang akan dilaksanakan adalah:
 - a. Pemetaan dan pemantauan logistik hasil perikanan
 - b. Penataan rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik (koridor)
 - c. Pembinaan pelaku usaha perikanan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil perikanan
 - d. Pembinaan pelaku usaha perikanan dan penyedia layanan jasa logistik dalam rangka distribusi dan transportasi hasil perikanan
 - e. Sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan

- f. Pemetaan logistik hasil Perikanan di daerah
 - g. Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan
 - h. Keikutsertaan dalam promosi skala internasional dan investasi
 - i. Pembinaan dan Pengelolaan Pasar Ikan
 - j. Peta preferensi, konsumsi dan kebutuhan ikan konsumen dalam negeri (Provinsi)
 - k. Peta preferensi, konsumsi dan kebutuhan ikan konsumen
 - l. Pemetaan dan strategi akses pasar negara tujuan ekspor
 - m. Partisipasi daerah dalam mendukung pemasaran produk kelautan dan perikanan
 - n. Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) produk hasil KP yang dirumuskan
 - o. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan bagi Unit Pengolahan Ikan
 - p. Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil KP yang dibina
 - q. Kebutuhan bahan baku serta peningkatan nilai tambah UPI menuju zero waste
 - r. Sarana rantai dingin dan peralatan pengolahan yang disediakan
 - s. Ragam baru produk hasil kelautan dan perikanan bernilai tambah di lokasi yang dibina
 - t. Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)
 - u. Fasilitasi kemudahan pelaku usaha dan investasi
 - v. uji terap produk inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang dihasilkan
 - w. Sertifikasi SNI produk kelautan dan perikanan
 - x. Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
 - y. Penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang diselesaikan
 - z. Operasional pengawasan dan penjaminan mutu hasil produk perikanan
 - aa. Sarana dan prasarana pengujian mutu
 - bb. Penguatan UPT
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau – pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan
 - b. Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/ atau dimanfaatkan
 - c. Peningkatan produksi dan usaha garam nasional
 - d. Pembangunan sarana prasarana di kawasan wisata bahari
 - e. Peningkatan jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi
 - f. Peningkatan pengelolaan pulau-pulau kecil/ terluar
 - g. Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan

- dikuatkan kelembagaannya
- h. Meningkatnya lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan dan/ atau rencana aksi pengelolaan
 - i. Pengelolaan Biofarmakologi
 - j. Fasilitasi perizinan pengelolaan perairan
 - k. Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen RZ Kawasan Antar wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut
 - l. Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Rencana Zonasi KSN dan Rencana Zonasi KSNT yang ditetapkan Melalui Peraturan Perundangan dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut
 - m. Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)
 - n. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan
 - o. Pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif
 - p. Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan bidang pengawasan SDKP yang efektif
 - q. Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya
 - r. Unit usaha yang melakukan distribusi hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya
 - s. Penyadaryatahuan masyarakat KP dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang tertib dan bertanggungjawab
 - t. Operasional Pengawasan ekspor, impor dan domestik
 - u. Harmonisasi Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati Ikan dalam dan luar Negeri
 - v. Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan karantina
 - w. Peningkatan UPT
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Hasil riset yang dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan dan sektor industri
 - b. Iptek hasil kegiatan riset, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan KP yang dimanfaatkan oleh masyarakat
 - c. SDM KP peserta diklat yang terserap di di Dunia Usaha dan Dunia Industri serta membentuk startup (usaha rintisan)
 - d. Penerapan Teknologi Adaptif Lokasi (TAL) Hasil Riset Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan

- e. Pembentukan kelompok kelautan dan perikanan mandiri
 - f. Pelatihan masyarakat KP yang bersertifikasi kompetensi
 - g. Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten
 - h. Peningkatan sarana dan prasarana riset, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan KP
 - i. Peningkatan UPT
6. Tatakelola pemerintahan yang baik. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Indeks Profesionalisme ASN
 - b. Indek SPBE
 - c. Level maturitas SPIP
 - d. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran KKP
 - e. Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP
 - f. Nilai / Predikat Sakip KKP

Implementasi hal di atas dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

Pengarusutamaan dalam Renstra 2020-2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada Dokumen RPJMN 2020-2024 yang telah menetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatifadaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat *mainstreaming* ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

TPB/SDGs mencakup 17 Tujuan/Goal, 169 target, dan 241 indikator. Dalam melaksanakan TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antardimensi pembangunan yang saling berpengaruh. Dimensi pembangunan yang dimaksud meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

KKP akan memperkuat komitmen pelaksanaan target TPB 14 Ekosistem Lautan (*Life Below Water*) yang mencakup diantaranya: 1) Mengurangi pencemaran laut termasuk sampah laut; 2) Mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan; 3) Meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut; 4) Mengatur kuota penangkapan per wilayah agar sumber daya ikan tetap berkelanjutan; 5) Melestarikan wilayah pesisir dan laut; 6) Mengatur subsidi perikanan agar tidak berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebih; 7) Meningkatkan manfaat ekonomi atas pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air dan pariwisata berkelanjutan; 8) Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan; 9) Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil terhadap sumber daya laut dan pesisir; dan 10) Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menetapkan hukum internasional yang tercermin dalam the *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS).

2. Gender

Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilakukan adalah percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di semua bidang pembangunan di tingkat pusat, dan daerah, yang mencakup: 1) Penguatan 7 prasyarat PUG: komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, partisipasi masyarakat; 2) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); 3) Penyiapan roadmap PUG; 4) Pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi antar unit eselon I di KKP dan antar pusat-daerah; 5) Pembuatan profil gender; dan 6) Monitoring dan evaluasi serta pengawasan Pengarusutamaan Gender (PUG) KKP.

3. Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan local (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

Pembangunan kebudayaan ingin memastikan bahwa setiap penduduk memperoleh perlindungan hak kebudayaan dan kebebasan berekspresi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Peningkatan pembangunan inklusif dan berwawasan budaya lingkup KKP, diantaranya adalah 1) Pelaksanaan pembangunan yang mengindahkan nilai budaya, kearifan lokal dan keragaman SDA hayati; 2) Pengembangan dan penguatan budaya bahari dan literasi bahari; dan 3) Pemberdayaan masyarakat adat pesisir dan pulau-pulau kecil.

4. Transformasi Digital

Pengarustamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarustamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan *big data*.

Penyiapan layanan digital terintegrasi lingkup KKP yang mencakup penyiapan regulasi, penguatan kelembagaan, pembangunan jaringan, sarpras, meningkatkan kapasitas SDM dengan keahlian digital, melakukan kerja sama untuk menyediakan layanan digital dan *one data* serta penataan sistem perizinan berbasis web (*online*), termasuk penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan peningkatan usaha kelautan dan perikanan melalui *e-commerce*.

3.2 Arah dan Kebijakan Strategis Pembangunan Perikanan Tangkap

Pendekatan Konseptual

Pembangunan sebuah sub sektor harus mulai dikembangkan ke dalam proses yang lebih dinamis; mempertimbangkan isu terkini serta berupaya mengantisipasi tantangan di masa mendatang untuk mencapai sebuah tujuan pembangunan. Selain itu dalam kerangka sistem perencanaan nasional, pembangunan sebuah sub sektor juga sudah seharusnya memiliki referensi yang erat dengan pembangunan pada skala yang lebih luas yakni sektoral maupun nasional.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan tangkap terutama dilaksanakan untuk mendukung pembangunan nasional pada agenda 1 “**memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan**” dan agenda 2 “**mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan & menjamin pemerataan**”. Agenda penguatan ketahanan ekonomi akan diwujudkan melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan, serta akselerasi peningkatan nilai tambah. Adapun agenda pengembangan

wilayah akan diwujudkan melalui keterpaduan pembangunan dengan memperhatikan pendekatan spasial yang didasarkan bukti data, informasi dan pengetahuan yang baik, akurat dan lengkap.

Bisnis proses perikanan tangkap merupakan sebuah sistem yang menjelaskan bagaimana usaha perikanan tangkap berjalan, mulai dari penjabaran kegiatan input, interaksi antar kegiatan, sampai pada alur pencapaian output dari pembangunan sub-sektor perikanan tangkap. Bisnis proses juga biasanya mengidentifikasi keterlibatan *stakeholder* serta menjelaskan hubungan keterkaitannya. Dengan demikian hal tersebut menegaskan kembali bahwa dalam konteks perencanaan strategis pembangunan perikanan tangkap, penyertaan kerangka bisnis proses sebagai dasar menjadi bersifat mutlak.

Mengacu pada perkembangan terkini konsep pengelolaan perikanan, manajemen perikanan tangkap akan diperspektifkan ke dalam 3 aspek utama yakni: 1) Manajemen nelayan; 2) Manajemen sumber daya ikan; serta utilisasi keduanya melalui 3) Manajemen usaha penangkapan ikan, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Manajemen Nelayan

Manajemen nelayan terdiri dari 2 komponen utama pembentuk yakni dukungan terhadap usaha perikanan nelayan serta dukungan terhadap *social security* nelayan. Dukungan usaha perikanan bertujuan untuk mengakselerasi usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan, seperti misalnya perbaikan mindset, peningkatan kapasitas terhadap penggunaan teknologi, serta fasilitasi akses pendanaan.

Adapun dukungan terhadap *social security* bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga nelayan, melalui diversifikasi usaha serta fasilitasi penyaluran jaminan kesehatan, pendidikan, maupun perbaikan lingkungan permukiman nelayan. Manajemen nelayan mencakup berbagai komponen kegiatan pada kegiatan kenelayanan.

2. Manajemen Sumber Daya Ikan

Manajemen sumber daya ikan terdiri dari 2 komponen utama pembentuk yakni pengaturan alokasi (sumber daya ikan dan izin) serta pemantauan pelaksanaan perizinan. Pengaturan alokasi mencakup instrumen pengalokasian SDI dan izin oleh pemerintah pusat serta proses pemberian izin baik oleh pemerintah pusat, daerah, maupun upaya integrasi izin pusat-daerah.

Adapun pemantauan pelaksanaan perizinan dilakukan melalui instrumen penerapan e-logbook, penempatan observer, serta peningkatan kepatuhan pada laporan LKU-LKP. Optimalisasi manajemen sumber daya ikan, utamanya akan dapat tercapai seiring konsep

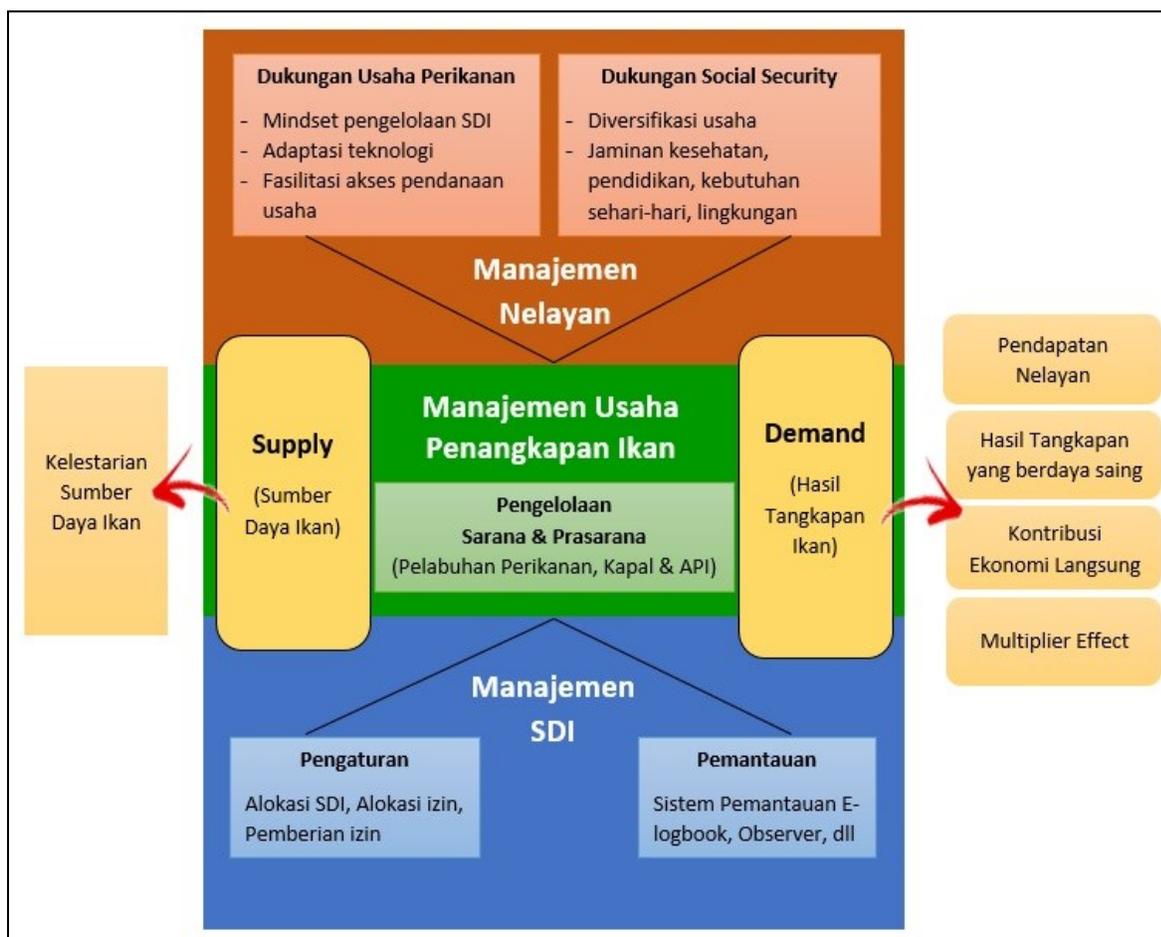
pengelolaan berbasis WPP diterapkan secara penuh. Manajemen sumber daya ikan mencakup berbagai komponen kegiatan pada kegiatan pengelolaan sumber daya ikan dan kegiatan pengelolaan perizinan.

3. Manajemen Usaha Penangkapan Ikan

Manajemen usaha penangkapan ikan berisi segala mekanisme terkait pengaturan pemanfaatan sumber daya ikan oleh nelayan, sehingga sifatnya merepresentasikan irisan antara manajemen sumber daya ikan dan manajemen nelayan. Selain itu, manajemen usaha penangkapan ikan juga dapat dianggap sebagai ujung tombak sinergi antara penyediaan supply (sumber daya ikan) dan pemenuhan demand (hasil tangkapan ikan).

Mengacu pada peran strategis tersebut, manajemen usaha penangkapan ikan sebenarnya menjadi tahapan yang paling penting dalam mencapai berbagai outcome pembangunan perikanan tangkap, yakni meliputi peningkatan kelestarian sumber daya ikan, pendapatan nelayan, daya saing hasil tangkapan, kontribusi ekonomi langsung, serta *multiplier effect* lainnya. Manajemen sumber daya ikan mencakup berbagai komponen kegiatan pada kegiatan pengelolaan pelabuhan perikanan, dan kegiatan pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan.

Semakin tingginya faktor permintaan terhadap produk perikanan serta adanya potensi keterbatasan dukungan ekosistem perikanan, seringkali semakin mendorong ketidakseimbangan terhadap usaha penangkapan ikan yang ideal. Pembelajaran pada periode pembangunan sebelumnya tahun 2015-2019 semakin memperlihatkan bahwa tren pengelolaan perikanan tangkap di masa mendatang akan semakin mengerucut pada permasalahan *supply* dan *demand*. Untuk memenuhi keseimbangan *supply-demand* tersebut, hubungan 3 aspek utama dalam konsep manajemen perikanan harus berjalan secara seimbang, yakni antara aspek sosial, ekonomi serta aspek lingkungan ataupun seringkali direpresentasikan melalui hubungan antara *stakeholder* nelayan, pengusaha, dengan pemerintah (**Gambar 3.1**). Penggunaan pendekatan *supply-demand* juga dilakukan dalam rangka mewujudkan arah kebijakan utama industrialisasi sektor kelautan dan perikanan yang telah dicanangkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.



Gambar 4. Implementasi Pendekatan Supply-Demand terhadap Manajemen Perikanan Tangkap

Arah Kebijakan dan Strategi

Secara khusus, kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan pada pembangunan sub sektor perikanan tangkap diarahkan untuk memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan izin, pengembangan pelabuhan, penangkapan ikan sampai dengan ZEE dan laut lepas, serta peningkatan pendapatan melalui akses permodalan, perlindungan dan perbaikan hidup nelayan.

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut di atas, Ditjen Perikanan Tangkap telah melakukan penterjemahan arah kebijakan pembangunan perikanan tangkap ke dalam 2 arah kebijakan yakni 1) Kebijakan Pokok dan 2) Kebijakan Pengarusutamaan, termasuk berbagai indikasi strategi pelaksanaan, serta penetapan kegiatan prioritas di dalamnya.



Gambar 5. Pendekatan Perencanaan Strategis Sub Sektor Perikanan Tangkap, Arah Kebijakan Utama, Serta Kegiatan Prioritas Tahun 2020-2024

Kebijakan Pokok

a. Membuka komunikasi dengan stakeholder untuk harmonisasi kebijakan berbasis data, informasi dan pengetahuan yang faktual

Kebijakan ini dilakukan melalui pendekatan: 1) Kajian atas regulasi dalam rangka percepatan investasi sub bidang perikanan tangkap; 2) Konsultasi publik dengan stakeholder untuk perumusan kebijakan; 3) Pendekatan ilmiah/akademik berbasis data dan pengetahuan faktual dalam perumusan kebijakan; 4) Koordinasi dengan Kementerian Koordinator dan laporan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk penetapan kebijakan perikanan tangkap; 5) Kunjungan kerja dan diskusi stakeholders di pelabuhan perikanan dan sentra nelayan. Arah kebijakan ini dilakukan dengan basis pendekatan data faktual, keterbukaan informasi secara bertanggungjawab berbasis website dan transparansi, dan berbasis riset dan pengetahuan faktual.

b. Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap yang berkelanjutan.

Pengelolaan perikanan tangkap dilakukan melalui peningkatan efektivitas tata kelola sumber daya perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Optimalisasi Produktivitas Sarana Prasarana Perikanan Tangkap

Utamanya akan dilakukan melalui utilisasi armada perikanan tangkap sebagai

sarana prasarana utama produksi. Operasional kapal perikanan, selektivitas penggunaan alat penangkapan ikan, serta kapasitas awak kapal perikanan dapat dianggap sebagai ujung tombak dalam upaya menciptakan pengelolaan perikanan yang seimbang. Dalam hal ini artinya diharapkan perangkat armada perikanan tangkap tersebut, bukan hanya mampu menghasilkan volume produksi yang tinggi, namun juga produk perikanan yang lebih berdaya saing, serta sekaligus dapat menjaga stabilitas ekosistem perikanan dan daya dukung lingkungan.

Tingginya peluang pemanfaatan sumber daya perikanan di wilayah perairan Indonesia, serta rencana akselerasi di ZEEI dan laut lepas perlu direspon melalui konsep industrialisasi sarana-prasarana penangkapan ikan, yakni meliputi: peningkatan efiseinsi-kemampuan jangkauan operasional, kualitas hasil tangkapan, serta jaminan ketenagakerjaan. Sistem manajemen armada pun (pendaftaran, penandaan, persetujuan dan evaluasi operasional) perlu diperkuat pada lingkup nasional untuk dapat mewujudkan konsep industrialisasi yang berkelanjutan.

Restrukturisasi armada perikanan harus menciptakan kinerja yang lebih efisien melalui adopsi teknologi ramah lingkungan yang telah teradaptasi kearifan lokal. Pelibatan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan pun perlu ditingkatkan sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan pemahaman maupun kapasitas nelayan dalam pemanfaatannya.

Dalam upaya mewujudkan optimalisasi produktivitas sarana prasarana perikanan tangkap, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a) Restrukturisasi dan modernisasi kapal perikanan, alat penangkapan ikan, mesin dan alat penangkapan ikan;
- b) Peningkatan produktivitas penggunaan alat penangkapan ika dan alat bantu penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
- c) Peningkatan standarisasi kapal perikanan yang memenuhi aspek laik tangkap dan laik simpan, termasuk pemanfaatan energi terbarukan;
- d) Peningkatan standar rancang bangun, keselamatan dan keamanan kerja di kapal perikanan;
- e) Peningkatan nilai ekonomi ikan hasil tangkapan melalui peningkatan kualitas penanganan ikan di atas kapal perikanan (CPIB);
- f) Manajemen tata kelola (pendaftaran, penandaan, persetujuan pembangunan kapal dan pemantauan operasional) kapal perikanan nasional secara elektronik dan terintegrasi;

- g) Optimalisasi dan mekanisasi penangkapan ikan dengan penerapan rekayasa teknologi penangkapan pada alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan dan armada perikanan tangkap; dan
- h) Perlindungan dan peningkatan kapasitas awak kapal perikanan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bidang perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan awak kapal perikanan.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan industri perkapalan nasional, untuk mendukung pergerakan industri perikanan nasional; 2. Intensifikasi tata kelola kapal perikanan nasional, khususnya pada kapal izin daerah dan kapal perikanan swasta; 3. Peningkatan keterlibatan pada tata kelola awak kapal perikanan; 4. Peningkatan manajemen data armada perikanan nasional.

2) Penyediaan Infrastruktur Perikanan Tangkap yang Terintegrasi

Implementasi pengembangan infrastruktur berdasarkan bisnis proses usaha perikanan tangkap menjadi kunci utama dalam mewujudkan industrialisasi; dengan mengedepankan outcome berupa efisiensi pengelolaan dan nilai tambah hasil tangkapan ikan. Sinergi pengembangan infrastruktur diarahkan bukan hanya bersifat antar sektor, melainkan juga antar wilayah, serta diperkuat dengan peningkatan konektivitas melalui intensifikasi teknologi informasi dengan basis data yang lebih akurat. Secara umum arah kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong sistem infrastruktur perikanan tangkap yang terintegrasi dari hulu ke hilir, bermutu dan berdaya saing; termasuk integrasinya dengan sektor terkait, seperti industri, jasa, dan perhubungan/transportasi.

Pengelolaan berbasis WPP pun mendorong secara spesifik peran infrastruktur perikanan tangkap, utamanya pelabuhan perikanan untuk semakin diarahkan sebagai sentra lokasi dari setiap kegiatan perikanan tangkap di setiap WPP, serta untuk semakin mewujudkan konektivitas logistik ikan baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri. Artinya pelabuhan perikanan mulai memiliki tanggung jawab kewilayahan dalam menjalankan fungsinya. Untuk mendukung hal tersebut, melalui kegiatan prioritas “Pelabuhan Perikanan Unggul”, fasilitas pelabuhan perikanan akan terus dikembangkan pada tahap lebih lanjut, serta ditingkatkan perannya.

Dalam upaya penyediaan infrastruktur perikanan tangkap yang terintegrasi, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a) Peningkatan mutu ikan dan penerapan standarisasi ramah lingkungan melalui *Eco Fishing Port*, termasuk didalamnya penguatan instrumen SHTI;
- b) Penguatan SDM dan fungsi kesyahbandaran; intensifikasi pelibatan pemerintah daerah;
- c) Standarisasi ketersediaan-kualitas fisik sarana prasarana, operasional, fungsi pelayanan (ISO-9001), serta penetapan aspek hukum di wilayah kerja pelabuhan perikanan (WKOPP);
- d) Peningkatan sinergi bisnis perikanan terutama dengan sistem pengolahan dan pemasaran, termasuk melalui integrasinya dengan pasar ikan bertaraf internasional;
- e) Peningkatan keterpaduan pelabuhan perikanan UPT pusat dan UPTD dalam mengimplementasikan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan (RIPPN); baik dari aktivitas, data dan informasi, serta peningkatan konektivitasnya melalui sistem IT, termasuk melalui pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah maupun alternatif peningkatan kelembagaannya;
- f) Penguatan manajemen risiko fasilitas, termasuk terhadap faktor alam (pendangkalan, bencana alam); dan
- g) Peningkatan fungsi operasional SKPT Merauke, SKPT Natuna, SKPT Sebatik, dan SKPT Saumlaki.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan
1. Alternatif pembiayaan dalam pembangunan fisik infrastruktur pelabuhan perikanan;
2. Sinergitas beberapa regulasi sebagai landasan pengembangan PP; terkait a) Pemerintahan Daerah, khususnya pada proses pengalihan P3D (Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen) PP dan b) RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil);
3. Optimalisasi peningkatan peran PP sebagai sentra ekonomi dan pusat aktivitas nelayan; utamanya untuk memudahkan fungsi kontrol pemerintah;
4. Intensifikasi tata kelola pengembangan PP secara nasional, baik yang melalui penganggaran APBN KKP, DAK, APBD maupun swasta.

3) Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)

Inisiasi pengelolaan perikanan berbasis WPP telah dilakukan sejak satu dekade terakhir, namun operasionalisasinya belum optimal. Padahal sampai dengan saat ini instrumen kelengkapannya tergolong telah siap, mulai dari Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP), Lembaga Pengelola Perikanan (LPP), infrastruktur dasar, maupun mekanisme pengaturan lainnya. Pengelolaan berbasis WPP diarahkan untuk berperan sebagai management authority yang mempunyai kewenangan penuh dalam mengelola WPP, khususnya dalam pelaksanaan dan evaluasi RPP. Termasuk didalamnya menyelesaikan isu-isu pengelolaan perikanan, serta sebagai wadah koordinasi dan sinergi dari pengelolaan perikanan di masing-masing WPP.

Upaya pemanfaatan sumber produksi akan terus didorong dari lokus-lokus potensial yang selama ini belum optimal intervensinya, seperti pada wilayah perairan umum daratan; mempertimbangkan tidak sedikit daerah yang secara geografis memiliki banyak wilayah perairan umum daratan seperti sungai dan danau. Selain itu semakin strategisnya posisi Indonesia pada sistem perikanan global sekaligus pertimbangan terhadap kedaulatan NKRI, pemanfaatan usaha penangkapan ikan di ZEEI dan laut lepas juga akan lebih diakselerasi, khususnya pada komoditas unggulan seperti tuna, cakalang, tongkol. Di sisi lainnya peningkatan sistem jaminan ketelusuran terus didorong melalui perluasan cakupan penerapan e-logbook serta penempatan observer on board pada kapal perikanan.

Dalam upaya optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a) Peningkatan operasionalisasi lembaga WPP dalam pengawasan, pengalokasian SDI, sinergi pembangunan pusat-daerah dan antar-daerah, serta penyelesaian isu kewilayahan termasuk nelayan andon;
- b) Peningkatan kepatuhan pelaku usaha melalui kepatuhan pelaksanaan e-logbook secara nasional untuk kapal > 5 GT, serta perluasan cakupan observer di atas kapal perikanan;
- c) Penguatan basis pengalokasian sumber daya ikan, sebagai dasar optimalisasi pemanfaatan;

- d) Peningkatan produktivitas perairan umum daratan, melalui perluasan cakupan pendataan serta pengembangan LP3D (Lembaga Pengelolaan Perikanan Perairan Darat);
- e) Peningkatan produktivitas ZEEI dan laut lepas, khususnya melalui pemanfaatan investasi tuna, cakalang, tongkol; serta mendorong kerjasama bilateral, regional dan internasional, khususnya pada forum RFMO; dan
- f) Mendorong sertifikasi dan sistem ketertelusuran (*traceability*) hasil tangkapan ikan.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan
1. Penguatan basis data pengalokasian SDI; intensifikasi koordinasi dengan otoritas penyusun stok SDI dan akademisi (<i>backward linkage</i>);
2. Penguatan fungsi manajemen pemanfaatan SDI melalui pengendalian perairan overfishing dan optimalisasi perairan underfishing; Intensifikasi koordinasi dengan unit kerja pemanfaatan usaha (<i>forward linkage</i>), seperti dalam alokasi izin, kapal, dan pengembangan PP;
3. Intensifikasi koordinasi dengan Pemda terkait operasionalisasi WPP, penyelesaian andon, pemanfaatan perairan umum daratan.

4) Reformasi instrumen perizinan untuk keberlanjutan sumber daya ikan dan usaha perikanan tangkap

Upaya pemberantasan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fisheries* (IUUF) sejauh ini telah terbukti mampu berkontribusi pada pemulihan stok sumber daya. Melanjutkan momentum baik tersebut, perizinan didorong untuk menjadi instrumen pengakselerasi usaha (dengan otoritas pemerintah terus melakukan penyederhanaan sistem) yang bertanggungjawab (dengan pelaku usaha semakin tertib aturan).

Dalam rangka mendukung pengelolaan berbasis WPP, alokasi dan evaluasi izin dari otoritas nasional harus menjadi acuan dasar untuk diaplikasikan secara ketat, termasuk di tingkat daerah. Sebagai langkah awal, upaya integrasi perizinan perlu diintensifkan, yakni antar K/L (KKP dan Kemenhub) maupun antara pusat-daerah (KKP dan Pemda). Dengan cakupan pengaturan yang luas dan bersifat antar kewenangan tersebut, pemutakhiran penggunaan *e-service* dan *platform* yang terintegrasi perlu terus didorong untuk membangun sistem perizinan yang real-time, transparan, dan terukur.

Dalam upaya mengimplementasikan reformasi instrumen perizinan untuk keberlanjutan sumber daya ikan dan usaha perikanan tangkap, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a) Peningkatan dan penyebarluasan SILAT;
- b) Sinergi mekanisme perizinan usaha penangkapan ikan dengan Kemenhub, termasuk upaya integrasi maupun intensifikasi pelaksanaan gerai di daerah;
- c) Sinergi sistem perizinan pusat dan daerah yang lebih tertata;
- d) Pemutakhiran dan peningkatan inovasi pelaksanaan *e-services*;
- e) Peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaporan usaha perikanan tangkap; dan
- f) Implementasi perizinan berdasarkan alokasi usaha penangkapan ikan.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan
1. Sinergitas regulasi terkait Pemerintahan Daerah; kewenangan perizinan dan penerbitan BPKP oleh pemerintah daerah
2. Sinergitas peraturan daerah (Perda) terkait sistem perizinan, dalam upaya mengintegrasikan sistem perizinan pusat-daerah
3. Inovasi teknologi dalam pelaporan usaha untuk meningkatkan kualitas data pemanfaatan SDI dan potensi pendapatan negara

5) Pemberdayaan usaha dan perlindungan nelayan

Mengacu pada pembelajaran sebelumnya bahwa program bantuan sebenarnya secara akumulatif dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan nelayan, namun dengan beberapa catatan seperti perlunya pelibatan aktif pemerintah daerah maupun nelayan itu sendiri. Dengan demikian kedepannya program serupa perlu didorong agar lebih memperhatikan perspektif stakeholder utama nelayan serta memposisikan DJPT bukan hanya sebagai pelaksana lapangan, melainkan juga koordinator dari sistem perlindungan nelayan yang lebih luas.

Pada dasarnya pemenuhan *social security* masih menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat miskin, termasuk nelayan. Kebutuhan biaya hidup sehari-hari, kesehatan, pendidikan keluarga, serta perbaikan lingkungan, mendorong nelayan untuk memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dari hasil penangkapan ikan. Sehingga secara psikologis, nelayan akan sangat sensitif terhadap segala perubahan sistem yang dapat mempengaruhi tingkat penghasilannya. Pemenuhan

kebutuhan dasar dimaksudkan juga agar nelayan lebih resisten terhadap ketidakpastian usaha penangkapan ikan, sekaligus untuk membentuk jaring pengaman sosial yang kuat dalam menghadapi berbagai situasi *force majeure* seperti bencana alam.

Dalam hal ini peran DJPT perlu dipertegas yakni untuk memfasilitasi peningkatan usaha nelayan serta sebagai koordinator/penyedia data kenelayanan yang akurat untuk memfasilitasi bantuan antar sektor. Peran nelayan maupun pemerintah daerah pun perlu disinergikan untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan nelayan secara tepat maupun mencegah timbulnya perbedaan persepsi antara nelayan dan pemerintah.

Dalam upaya pemberdayaan usaha dan perlindungan nelayan, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a) Peningkatan kualitas hidup nelayan melalui pengembangan kampung nelayan maju;
- b) Perlindungan dan bantuan nelayan melalui bantuan premi asuransi nelayan, termasuk perluasan skema asuransi mandiri, bantuan sarana penangkapan ikan, dll;
- c) Pemberdayaan kapasitas nelayan terhadap risiko mata pencaharian melalui diversifikasi usaha, peningkatan kewirausahaan serta literasi manajemen keuangan;
- d) Peningkatan kerjasama dalam pemenuhan kebutuhan dasar dari aspek permukiman (KemenPUPR), kesehatan (Kemenkes), Pendidikan (Kemendikbud), lingkungan (KemenLHK), dll;
- e) Penguatan kapasitas kelembagaan usaha nelayan; inovasi akses permodalan dan intensifikasinya termasuk melalui akses LPMUKP dan sertifikasi hak atas tanah nelayan, serta inisiasi pengembangan korporasi nelayan; dan
- f) Penguatan informasi kenelayanan melalui intensifikasi pelibatan daerah dan komunikasi dengan nelayan.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan
1. Penguatan database kenelayanan untuk menjaring kerjasama pemberdayaan-perlindungan nelayan dengan lintas sektor, pemda, swasta;
2. Penguatan jalur & mekanisme komunikasi dengan nelayan untuk pemetaan kebutuhan nelayan secara tepat dan responsif;
3. Mengarusutamakan nelayan sebagai subjek pemberdayaan, melalui perubahan mindset dan kapasitas nelayan untuk mandiri; bukan lagi hanya sebagai objek.

c. **Reformasi Birokrasi DJPT menuju birokrasi yang lebih berkualitas**

Reformasi birokrasi dilakukan dalam rangka implementasi RB DJPT berdasarkan prioritas dan kepentingan nasional yang dilakukan melalui 5 pendekatan, yaitu: 1) *Human Capital*; 2) *Organisation Capital (Right Sizing Organisation)*; 3) *Finacial and Planning Capital*; 4) *Information Capital*, serta 5) *Control Capital*.

Di masa mendatang, tantangan sub-sektor perikanan tangkap diprediksi akan semakin besar, baik pada lingkup sektoral maupun global. Dengan demikian maka peran organisasi kesekretariatan perlu didorong bukan hanya terfokus pada fungsi administratif kesekretariatan saja melainkan juga mulai memperkuat fungsi sebagai unit kerja *think-tank*; berperan dalam memberikan berbagai saran-pertimbangan, memberikan respon cepat (*quick analysis*), serta mengembangkan teori dan model pembangunan perikanan tangkap. Kesekretariatan juga perlu lebih membuka diri untuk mempermudah koordinasi lintas sektor.

Dalam rangka mendukung hal tersebut, beberapa strategi secara spesifik diarahkan untuk: 1) Peningkatan inovasi program; 2) Intensifikasi manajemen berbasis IT; 3) Peningkatan skala kerjasama bidang perikanan tangkap baik di lingkup KKP (antar Eselon I) maupun Nasional (antar K/L, Pemda, BUMN, swasta); 4) Penerbitan peraturan terkait proses bisnis perikanan yang berkeadilan dan berkelanjutan; 5) Harmonisasi dan revisi regulasi terkait; dan 6) Penguatan manajemen data, dengan pendataan yang lebih menyeluruh.

K/L LAIN	PEMDA	KKP
PU-PERA Jalan / Rumah / Dermaga Pelabuhan / air bersih	Penyiapan lahan	Tata ruang/zonasi/masterplan
KEMEN-ATR Sertifikasi Tanah Nelayan	Identifikasi permasalahan di daerah	Sarana Sistem Rantai Dingin
KEMENDAGRI Percepatan P3D, sinergi pusat-daerah	Identifikasi / pengurusan administrasi / penyaluran bantuan	Penyuluhan, Pelatihan, Penguatan kelembagaan kelompok
KEMEN-KOPERASI Pembentukan / Pembinaan Koperasi	Manajemen data kenelayanan	Riset teknologi perikanan tangkap
KEMHUB Pengukuran GT, dokumen kapal	Partisipasi pada forum kelembagaan WPP	Pengawasan SDKP
KEMENDES Sinergi dana desa, desa nelayan	Sinergi pembiayaan kegiatan prioritas nasional di daerah	Sarana Pemasaran
KEMENKOMAR Koordinasi / sinkronisasi, peluang investasi	Menggalang dukungan pembangunan dari pihak swasta maupun pihak lainnya	BUMN
	Integrasi sistem perizinan	Swasta
	Pengembangan pelabuhan	

Gambar 6. Pemetaan Dukungan Stakeholder Potensial terhadap Pembangunan Perikanan Tangkap

Kebijakan Pengarusutamaan

a. Tujuan Pembangunan berkelanjutan

Strategi pelaksanaan meliputi: 1) Penerapan konsep ekonomi hijau; 2) Penerapan konsep *eco fishing port*; 3) Alternatif penggunaan bahan bakar gas untuk kapal perikanan; 4) Inovasi teknologi API ramah lingkungan.

b. Gender

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui penguatan peran wanita nelayan dalam usaha perikanan tangkap.

c. Modal sosial budaya

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui pengaplikasian kearifan lokal dalam kegiatan penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan.

d. Transformasi digital

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui penggunaan teknologi dalam sistem pemerintahan (*e-logbook*, *e-services* perizinan, *e-layar*, dll).

Untuk mengakselerasi pencapaian arah kebijakan tersebut, Ditjen Perikanan Tangkap telah menginisiasi beberapa kegiatan prioritas yang diharapkan dapat menjadi kunci, memberikan

multiplier effect pada kegiatan lainnya, serta menghasilkan dampak langsung pada stakeholder. Kegiatan prioritas tersebut meliputi implementasi Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT), pemanfaatan investasi tuna, cakalang, tongkol, penyederhanaan regulasi perikanan tangkap, pengembangan pelabuhan perikanan unggul, pengembangan Kampung Nelayan Maju (KALAJU), serta armada perikanan yang kompetitif. Kegiatan prioritas setidaknya bersifat, namun tidak terbatas, sebagai akselerator setiap arah kebijakan serta terdapat unsur inovasi didalamnya. Kegiatan lainnya yang mengacu pada beberapa pertimbangan seperti dukungan legislatif dan berbagai kebijakan pimpinan lainnya masih dapat dikategorikan sebagai kegiatan prioritas dalam konteks pembangunan perikanan tangkap secara utuh.

Kegiatan Prioritas DJPT	Gambaran Umum
Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT)	Merupakan platform pengajuan izin usaha perikanan tangkap yang memungkinkan penerbitan izin dilakukan hanya dalam waktu 1 jam, dan keseluruhan prosesnya dilakukan secara online. Intensifikasi penggunaan serta berbagai pemutakhiran sistem perizinan masih terus akan dilakukan. Upaya reformasi perizinan ini merupakan salah satu gebrakan untuk meningkatkan pelayanan publik serta dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki iklim investasi perikanan tangkap
Pemanfaatan investasi tuna, cakalang, tongkol	Peluang pemanfaatan investasi tuna diprediksi dapat mencapai Rp 7 Triliun. Seiring upaya diplomasi yang terus diintensifikasi dengan pengelola perikanan regional-RFMO, upaya peningkatan investasi-industrialisasi serta peningkatan kapasitas nelayan lokal pada komoditas TCT terus diakselerasi
Penyederhanaan regulasi	Dalam rangka mewujudkan usaha penangkapan ikan yang berkeadilan serta iklim investasi yang baik, sejumlah peraturan disederhanakan dan beralih pada hukum positif. Beberapa substansi penyederhanaan utama meliputi kemudahan perizinan, pengaturan penggunaan alat penangkapan ikan yang sebelumnya dilarang, kemudahan transshipment, batasan ukuran kapal yang lebih berdaya saing di ZEEI-laut lepas serta lebih melindungi nelayan kecil di perairan kepulauan

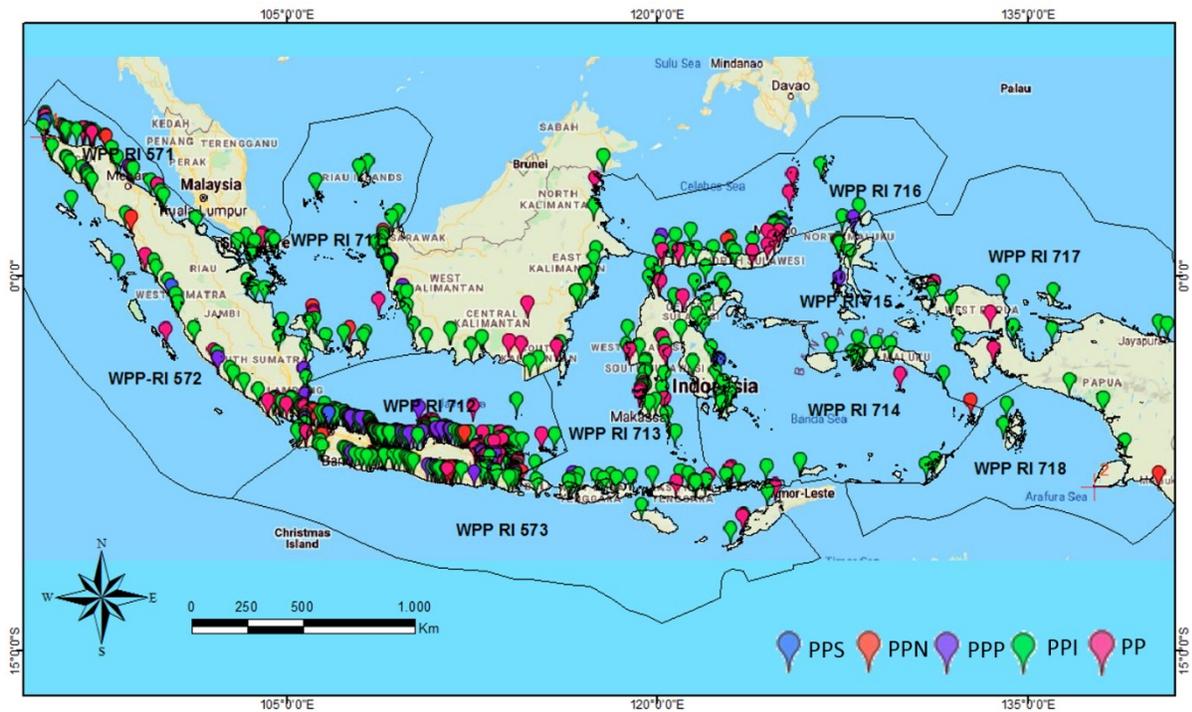
Kegiatan Prioritas DJPT	Gambaran Umum
Pelabuhan Perikanan Unggul	Peningkatan peran pelabuhan perikanan sebagai 1) pusat bisnis kelautan dan perikanan terintegrasi; 2) pusat layanan dan pendataan serta ketetelusuran yang maju, andal, dan akuntabel; serta 3) <i>Eco Fishing Port</i> , yakni dalam menjaga mutu ikan dan standarisasi ramah lingkungan
Kampung Nelayan Maju	Konsep perwujudan lingkungan permukiman nelayan yang maju, bersih, sehat dan nyaman yang mampu meningkatkan kualitas dan produktivitas kehidupan nelayan dan keluarganya. Salah satu strategi pengembangannya adalah melalui integrasi permukiman nelayan dengan pusat-pusat aktivitas ekonomi, seperti pelabuhan perikanan dan kawasan wisata bahari-kuliner
Armada Perikanan yang Kompetitif	Untuk mewujudkan industrialisasi perikanan, diperlukan armada perikanan (kapal perikanan, alat penangkapan ikan, awak kapal perikanan), serta manajemennya yang kompetitif. Konsep yang diusung yakni pemenuhan aspek ketertelusuran (<i>traceability</i>), standar keamanan kapal, penanganan ikan (<i>fish handling</i>), serta standar keselamatan kerja

Indikasi Pembangunan Kewilayahan

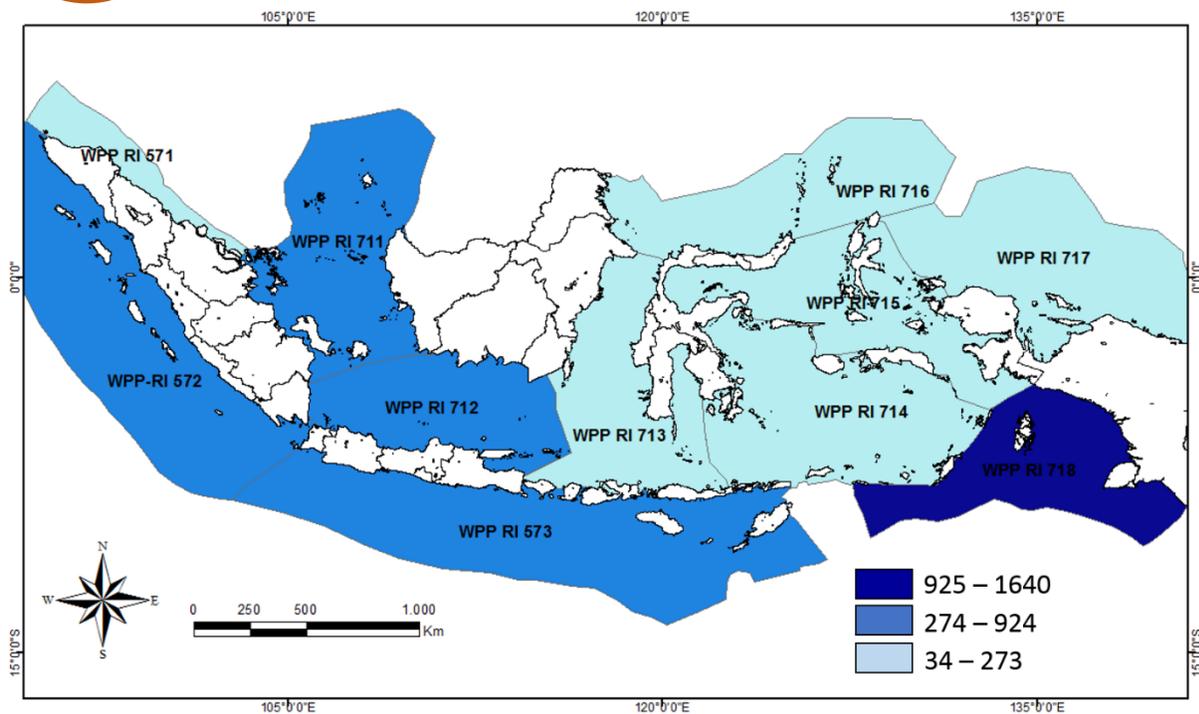
Sebagaimana amanat RPJMN 2020-2024 bahwa pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan nasional harus berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing. Dengan demikian pada bagian ini akan disajikan indikasi pembangunan perikanan tangkap tahun 2020-2024 berbasis kewilayahan berdasarkan: 1) Data Eksisting, yaitu sebaran 538 Pelabuhan Perikanan per WPP serta sebaran kapal perikanan perizinan pusat per WPP; maupun 2) Data Proyeksi, terdiri dari pertumbuhan volume produksi per provinsi, pertumbuhan nilai produksi per provinsi, pertumbuhan jumlah nelayan per provinsi, pertumbuhan NTN per provinsi, pertumbuhan volume produksi per WPP, produksi komoditas TCT per WPP, serta produksi komoditas utama per WPP.



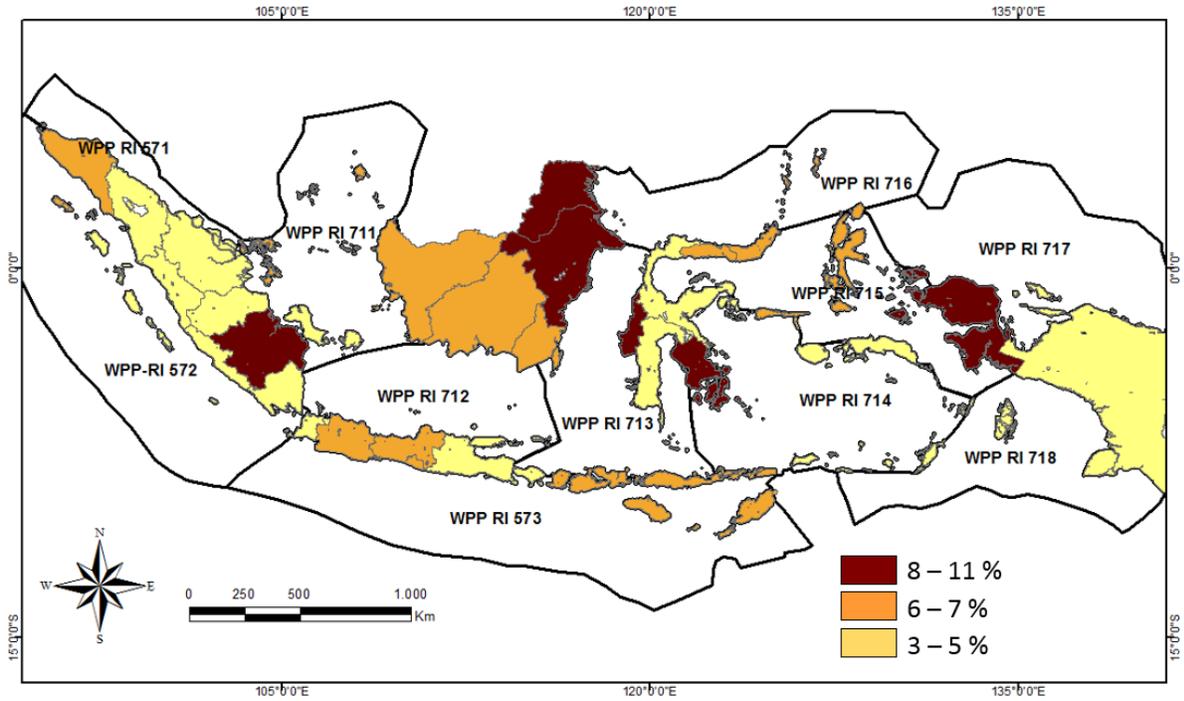
Sebaran 538 Pelabuhan Perikanan
per WPP



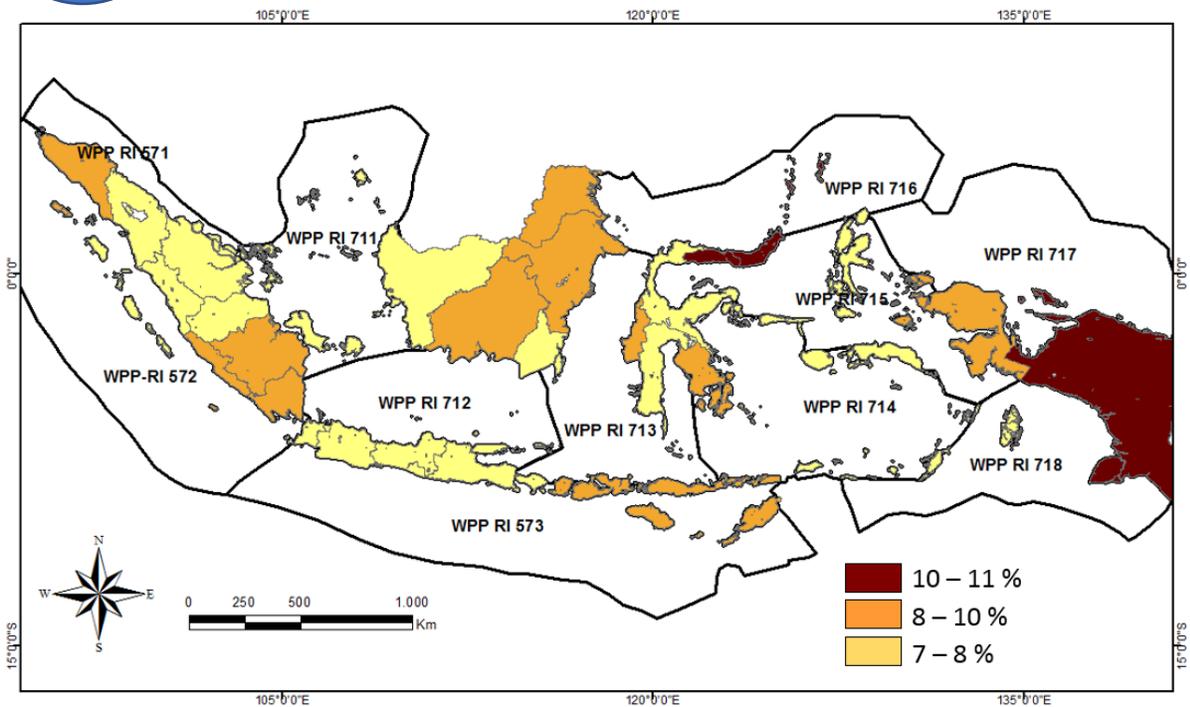
Sebaran Kapal Perikanan Perizinan Pusat per WPP (per September 2019)



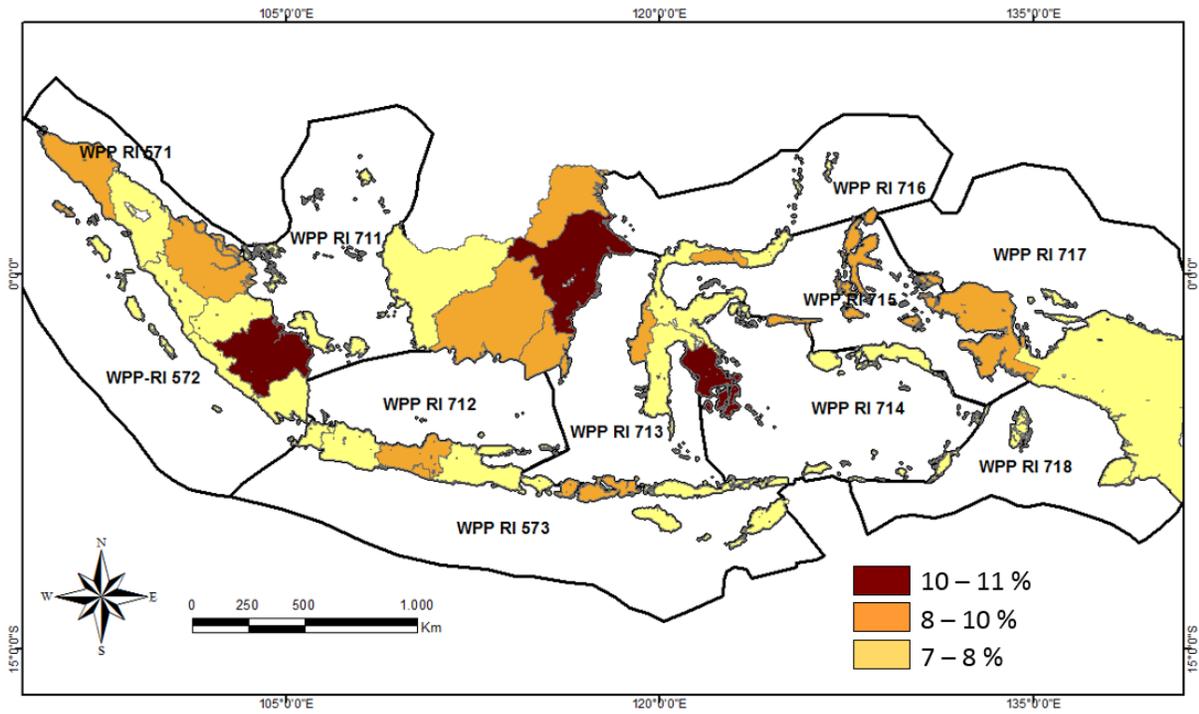
Proyeksi Pertumbuhan Volume Produksi per Provinsi 2020-2024



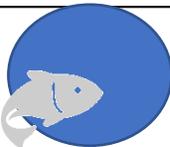
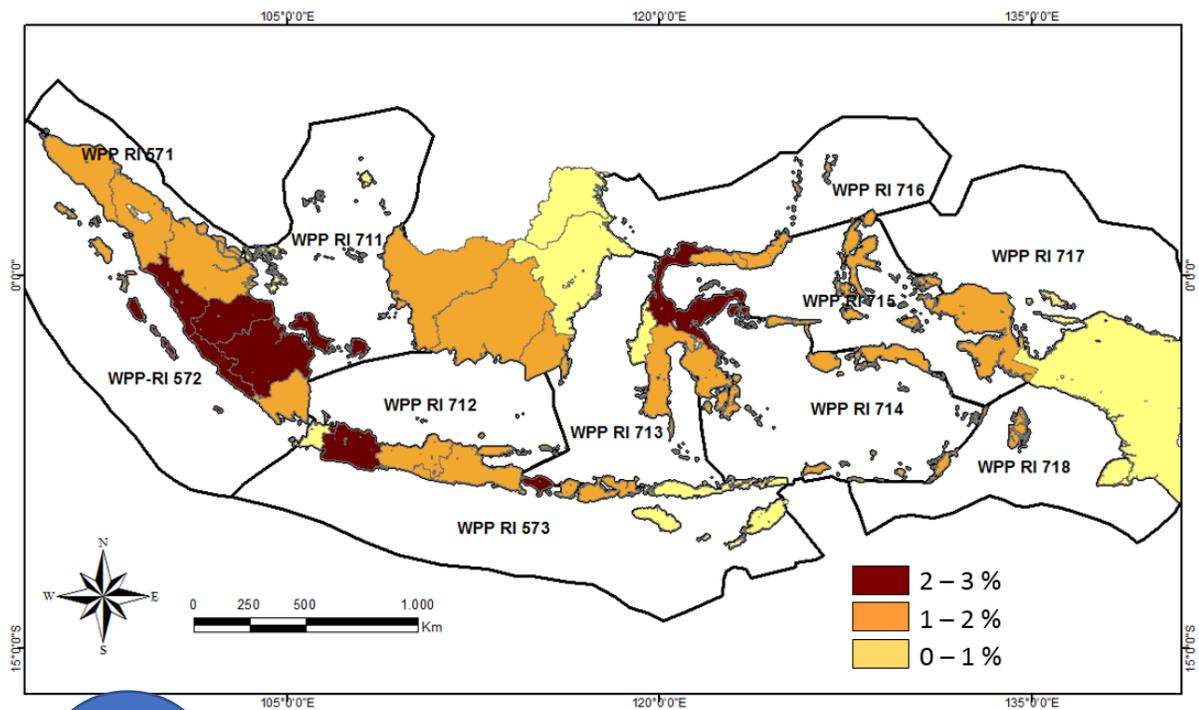
Proyeksi Pertumbuhan Nilai Produksi
per Provinsi 2020-2024



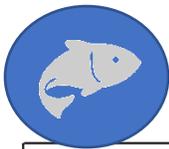
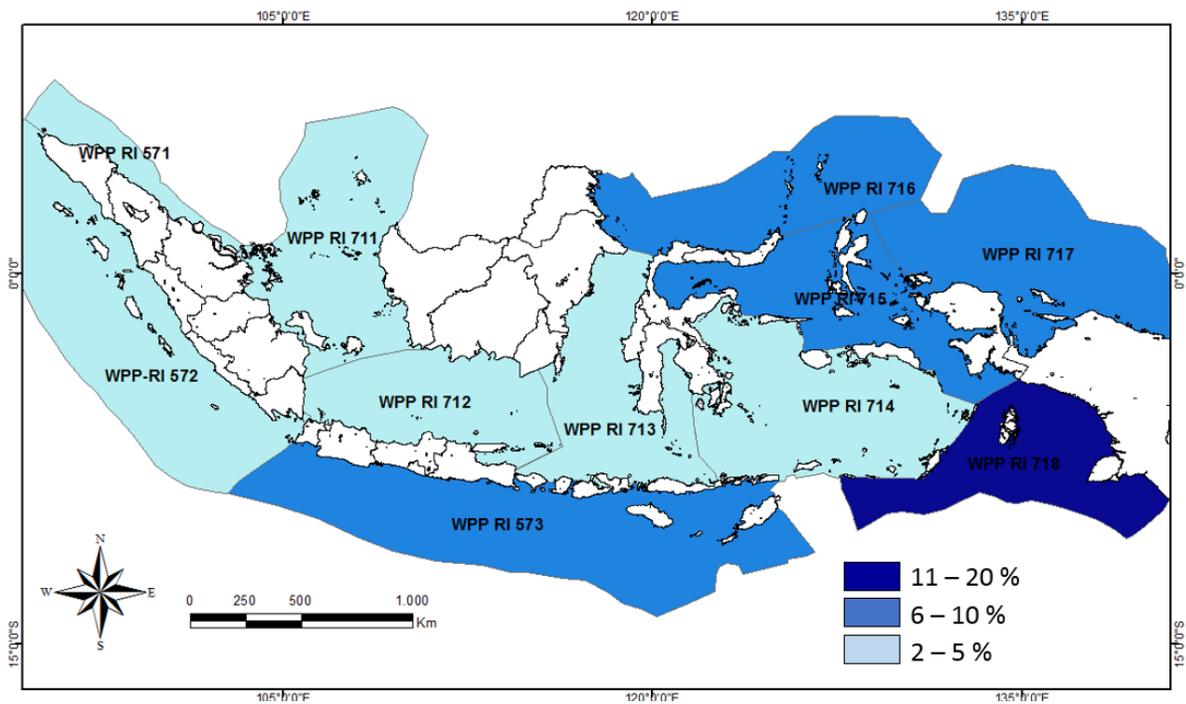
Proyeksi Pertumbuhan Jumlah Nelayan
per Provinsi 2020-2024



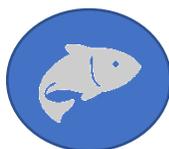
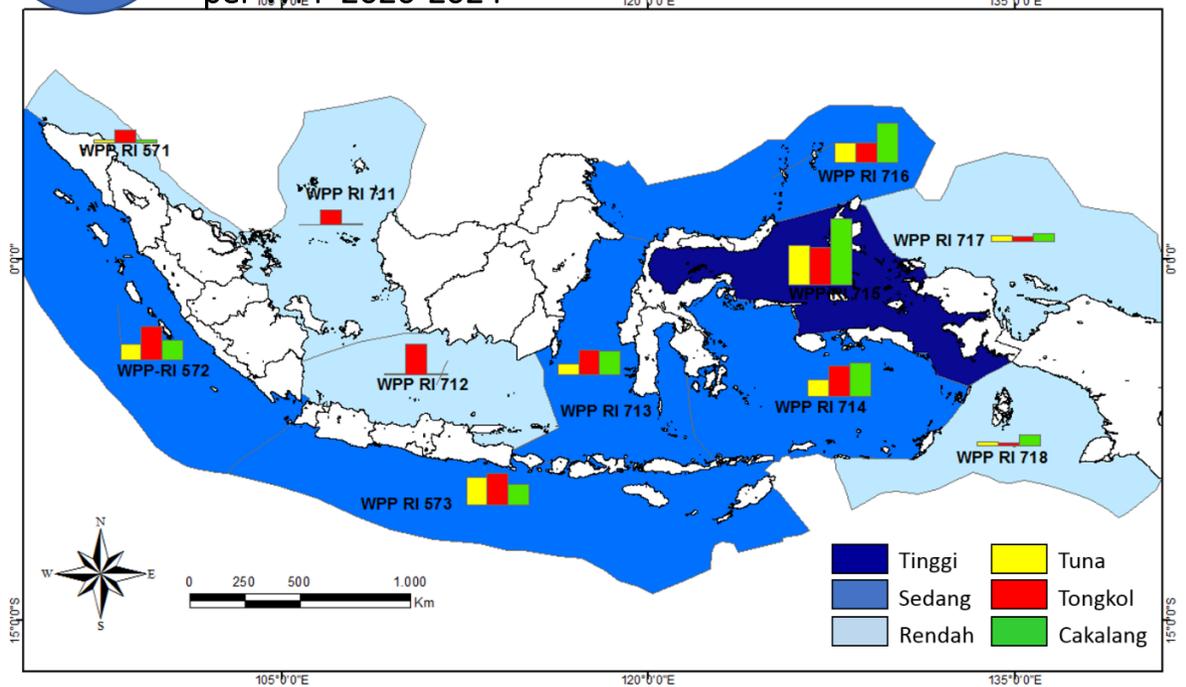
**Proyeksi Pertumbuhan NTN
per Provinsi 2020-2024**



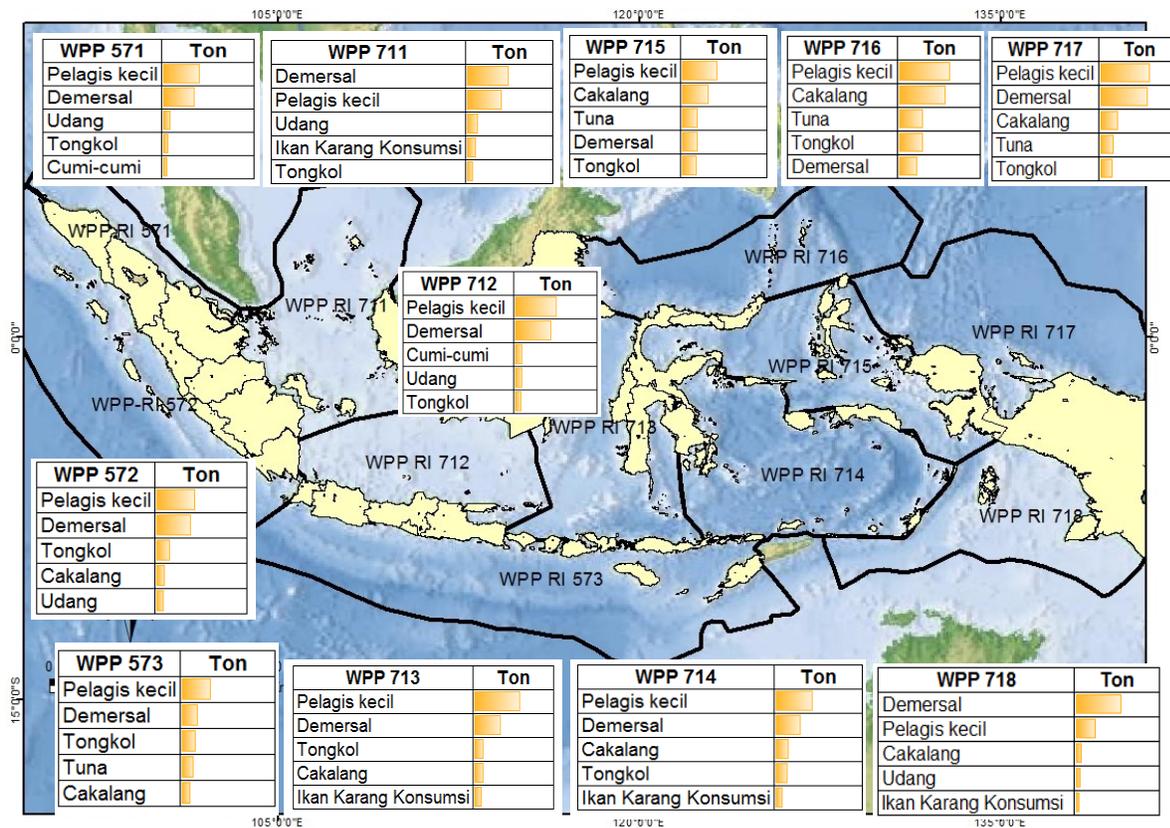
**Proyeksi Pertumbuhan Volume Produksi
per WPP 2020-2024**



Proyeksi Produksi Komoditas TCT
per WPP 2020-2024



Proyeksi Produksi Komoditas Utama
per WPP 2020-2024



Kerangka Regulasi

Dalam rangka menciptakan iklim usaha di bidang perikanan tangkap, maka kerangka regulasi merupakan instrumen yang penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam pembangunan industri perikanan tangkap nasional. Adapun beberapa regulasi yang akan disusun, diperbaharui dan ditetapkan selama periode 2020-2024 sesuai dengan **Lampiran 1**.

Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat kementerian/lembaga (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN Nasional.

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

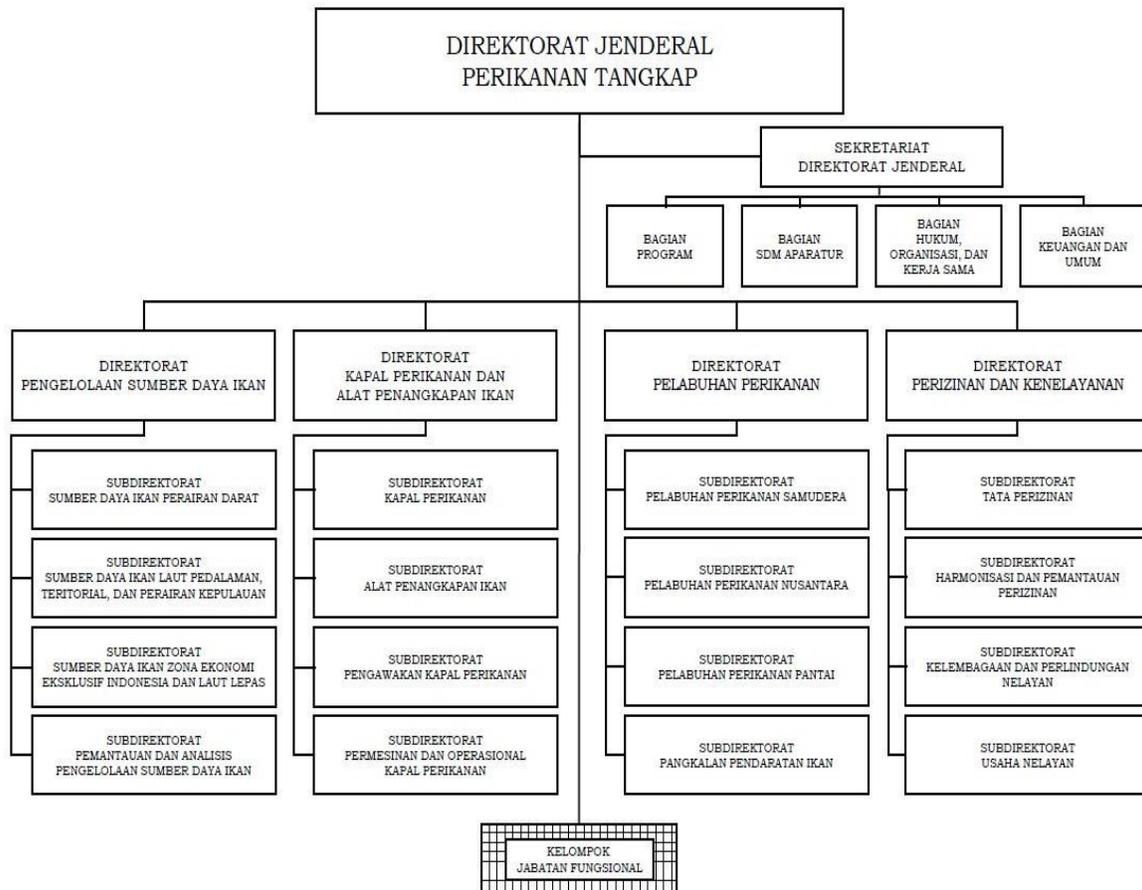
Penguatan kapasitas kelembagaan Ditjen Perikanan Tangkap dilakukan dengan memperhatikan perubahan di tingkat Kementerian Kelautan dan Perikanan, yakni sebagai berikut:

1. Perubahan paradigma pengelolaan sumber daya perikanan dari *production oriented* ke *people oriented*.

2. Mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi.
3. Kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peraturan perundangan terkait yang berlaku.
4. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang *right sizing*, *unified function*, efektif, efisien dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan kelautan dan perikanan.
5. Tata laksana dan sumber daya aparatur.

Mengacu pada evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada periode sebelumnya, terdapat beberapa usulan penyempurnaan fungsi serta struktur organisasi sebagai berikut:

1. Optimalisasi fungsi pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan berdasarkan substansi pengelolaan pelabuhan perikanan, meliputi: Identifikasi dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan, Pembangunan Pelabuhan Perikanan, Tata Operasional Pelabuhan Perikanan, Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan, serta Sistem Informasi dan Penguatan Keterpaduan Pelabuhan Perikanan; dan
2. Optimalisasi fungsi Subbag TU sebagai unit kerja kesekretariatan di lingkup direktorat yang menangani koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja, keuangan, dan barang milik negara, sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan, serta evaluasi dan pelaporan lingkup direktorat.



Gambar 7. Bagan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

3.3 Arah dan Kebijakan Strategis Pembangunan PPN Ternate

▪ Arah dan Kebijakan Strategis

Arah dan kebijakan startegis pembangunan PPN Ternate, terutama dititik beratkan untuk mendukung program pengelolaan perikanan tangkap.

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM (stakeholder dan petugas pelayanan) dalam rangka meningkatkan produksi perikanan tangkap;
2. Melakukan pembinaan dan fasilitasi usaha perikanan tangkap dengan peningkatan fasilitas pelabuhan yang mendukung usaha perikanan tangkap;
3. Meningkatkan pengawasan pemanfaatan SDI melalui penguatan fungsi-fungsi kesyahbandaran;
4. Pembangunan zona integritas dalam rangka mendukung pencapaian reformasi birokrasi DJPT.

Adapun strategi pencapaian arah kebijakan yang akan dilaksanakan di PPN Ternate dalam mendukung program pengelolaan perikanan tangkap sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM (stakeholder dan petugas pelayanan) dalam rangka meningkatkan produksi perikanan tangkap, melalui :
 - Melakukan inventaris data kebutuhan peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM (stakeholder dan petugas pelayanan);
 - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan peningkatan pengetahuan dan keterampilan;
 - Melakukan fasilitasi kegiatan peningkatan SDM.
2. Melakukan pembinaan dan fasilitasi usaha perikanan tangkap dengan peningkatan fasilitas pelabuhan yang mendukung usaha perikanan tangkap, melalui kegiatan:
 - Mengoptimalkan publikasi peluang usaha perikanan tangkap di PPN Ternate;
 - Penataan SOP pelayanan usaha di PPN Ternate;
 - Peningkatan fasilitas pendukung usaha perikanan tangkap;
 - Melakukan pemantauan, evaluasi dan pembinaan usaha di PPN Ternate.
3. Meningkatkan pengawasan pemanfaatan SDI melalui penguatan fungsi-fungsi kesyahbandaran;
 - Mengoptimalkan pelaporan pemanfaatan SDI melalui aplikasi e-logbook penangkapan ikan oleh nahkoda kapal perikanan;
 - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemanfaatan SDI;
 - Meningkatkan sosialisasi dan publikasi peraturan-peraturan terkait pemanfaat SDI;
 - Meningkatkan pengawasan mutu hasil perikanan;
4. Pembangunan zona integritas dalam rangka mendukung pencapaian reformasi birokrasi DJPT, melalui kegiatan:
 - Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran;
 - Meningkatkan integritas dan etos kerja pegawai PPN Ternate;
 - Melakukan penataan dan pembinaan organisasi
 - Menerapkan sistem pengendalian intern;
 - Pengendalian grativikasi.

▪ **Kerangka Regulasi**

Dalam rangka melaksanakan program pengelolaan perikanan tangkap, maka kerangka regulasi merupakan hal penting dalam memberikan arah dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun beberapa regulasi yang akan disusun, diperbaharui dan ditetapkan selama periode 2020-2024 sesuai dengan **Lampiran 2**.

▪ Struktur Organisasi

Penguatan dan kapasitas PPN Ternate sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2014 Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas dan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana dan program dan anggaran, pemantauan, dan evaluasi pelabuhan perikanan;
- 2) Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
- 3) Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
- 4) Pelaksanaan pemeriksaan *Logbook*;
- 5) Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
- 6) Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
- 7) Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- 8) Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana;
- 9) Pelaksanaan fasilitas penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
- 10) Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
- 11) Pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi
- 12) Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik (CPIB);
- 13) Pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
- 14) Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan; dan
- 15) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi pemerintahan pada pelabuhan perikanan merupakan fungsi untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, serta keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan di pelabuhan perikanan.
2. Fungsi perusahaan pada pelabuhan perikanan merupakan fungsi untuk melaksanakan perusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di pelabuhan perikanan.

Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Pelabuhan;
- b. Seksi Operasional Pelabuhan;
- c. Seksi Kesyahbandaran;
- d. Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha;
- e. Sub Bagian Tata Usaha;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 8. Struktur Organisasi PPN Ternate

BAB 4. INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Indikator kinerja PPN Ternate yang dilaksanakan melalui Pogram Pengelolaan Perikanan Tangkap tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4. Indikator Kinerja Program Pengelolaan Perikanan Tangkap di PPN Ternate

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap yang partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan	1	Jumlah produksi perikanan tangkap di PPN Ternate (Ton)	4,000	4,400	4,840	5,324	5,856
		2	Nilai produksi perikanan tangkap di PPN Ternate (Rp.Juta)	80,000	88,000	96,800	106,480	117,128
		3	Nilai PNBPN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Rp. Juta)	1,629	1,792	1,972	2,169	2,386
2.	Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan perikanan tangkap di pelabuhan perikanan yang adil berdaya saing, dan berkelanjutan	4	Persentase pelaksanaan rencana aksi pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan (persen)	100	100	100	100	100
		5	Jumlah lembaga pengelola perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional (WPP)	100	100	100	100	100
		6	Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan (unit)	1	1	1	1	1
		7	Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (persen)	60	60	60	60	60
		8	Jumlah perjanjian kerja laut (PKL) yang diterapkan di Pelabuhan Perikanan Nusnatara Ternate (orang)	80	80	80	80	80
		9	Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi berdasarkan keahlian dan keterampilan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (orang)	30	30	30	30	30
		10	Permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek	40	40	40	40	40

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
			2020	2021	2022	2023	2024	
		operasional penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusnatara Ternate (lokasi)						
		11 Persentase Penyampaian informasi perizinan pusat – daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (%)	100	100	100	100	100	100
		12 Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (nelayan)	1	60	60	60	60	60
3.	Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate yang kompeten, professional dan berintegritas	13 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Indeks)	60	72	72	72	72	72
4.	Terwujudnya birokrasi lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	14 Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (%)	80	100	100	100	100	100
		15 Persentase pemenuhan dokumen AKIP lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (%)	30	100	100	100	100	100
		16 Persentase pemenuhan dokumen Maturitas SPIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (%)	40	100	100	100	100	100
5.	Terkelolanya anggaran pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate secara efisien dan akuntabel	17 Nilai kinerja anggaran lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (nilai)	Baik (88)	Baik (88)	Baik (88)	Sangat Baik (>90)	Sangat Baik (>90)	Sangat Baik (>90)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran (Output).

Tabel 5. Indikator Kinerja Kegiatan di PPN Ternate

No	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Produksi Perikanan Tangkap					
	a. Volume Produksi (Ton)	4,000	4,400	4,840	5,324	5,856
	b. Nilai Produksi (Rp Juta)	80,000	88,000	96,800	106,480	117,128
2.	Frekuensi Kunjungan Kapal (kali)	2360	2,596	2,856	3,141	3,455
3.	Jumlah Kapal yang menerapkan Logbook Penangkapan Ikan	80	88	97	106	117
4.	Rasio Kecukupan Fasilitas	80	80	82	83	85
5.	Tingkat Operasional Pelabuhan	80	80	80	80	80
6.	Nilai PNBP (Rp)	1,629,845,000	1,792,829,500	1,972,112,450	2,169,323,695	2,386,256,065

4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan perikanan tangkap, serta mencapai target sasaran utama yang telah ditetapkan, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (APBN dan PNBP). Pendanaan APBN PPN Ternate difokuskan untuk pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan, peningkatan perizinan, pengelolaan sumberdaya ikan dan berbagai kegiatan pembangunan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang terkait dengan usaha perikanan tangkap.. Secara terinci kerangka pendanaan yang bersumber dari APBN dan PNBP sesuai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 1**.

BAB 5. PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate Tahun 2020–2024 merupakan acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) PPN Ternate, sehingga penyusunan lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta lebih efisien dalam pelaksanaannya, baik dipandang dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun dalam percepatan waktu realisasinya.

Renstra PPN Ternate Tahun 2020-2024 disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, serta kendala, dan permasalahan yang dihadapi sehingga penetapan target-target yang berorientasi pada hasil dan diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Kegiatan-kegiatan dengan output yang mendukung prioritas nasional menjadi prioritas utama, selain kegiatan-kegiatan yang secara langsung menjadi tanggung jawab dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PPN Ternate. Namun demikian, Renstra ini dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian sejalan dengan dinamika perkembangan internal dan eksternal organisasi.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan PPN Ternate juga dihasilkan berkat adanya dukungan seluruh pegawai masyarakat seluruh stakeholders perikanan tangkap. Kerja keras dari seluruh jajaran PPN Ternate dan sinergitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan serta sasaran program dan kegiatan PPN Ternate yang tertuang dalam Rencana Strategis ini.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian/Lembaga

NO	Kegiatan/ Detail kegiatan (output)	Target					Alokasi Anggaran (Juta Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
PROGRAM KEGIATAN PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP							13,643,301,000	15,007,631,100	16,508,394,210	18,159,233,631	19,975,156,994
A	PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN										
1	Laut pedalaman teritorial dan perairan kepulauan yang dikelola sumberdaya ikannya	1 WPP									
2	kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan	80 Unit	88	97	106	117					
3	Lembaga pengelola perikanan wilayah pengelola perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yag perasional	1 WPP									
B	PENGELOLAAN KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN										
1	awak kapal perikanan yang tersertifikasi	30 Orang									
2	Permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan	1 Provinsi									
3	Perjanjian kerja laut (PKL) yang diterapkan	30 Orang									
C	PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN										
1	Pelabuhan perikanan nusantara (PPN) yang diidentifikasi dan/atau ditingkatkan fasilitasnya	1 Lokasi									
2	Pelabuhan perikanan nusantara (PPN) yang meningkat operasionalnya	80%	80%	80%	80%	80%					
3	layanan sarana dan prasarana internal	1 Layanan									

D	PENGELOLAAN PERIZINAN DAN KENELAYAAN										
1	Pembinaan dan implementasi integrasi sistem perizinan pusat-daerah	1 provinsi									
2	Nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap	60 Orang									
E	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	1 Layanan									

Lampiran 2 Matriks Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1.	Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan administrasi	Sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pelayanan dan administrasi di PPN Ternate	Sub Bagian Tata Usaha	Seksi dan Sub Bagian di PPN Ternate, Satwas PSDKP, Stakeholder	2020
2.	Penetapan Standar Pelayanan	Sebagai tindak lanjut dari kegiatan Surveillance	Sub Bagian Tata Usaha	Seksi dan Sub Bagian di PPN Ternate, Satwas PSDKP, Stakeholder	2020
3.	Survei Kepuasan Masyarakat	Sebagai tindak lanjut dari kegiatan Surveillance dan evaluasi pelayanan	Sub Bagian Tata Usaha	Seksi dan Sub Bagian di PPN Ternate, Stakeholder	2020
4.	Penyusunan SPIP pelayanan dan administrasi	Pengawasan dan evaluasi kegiatan	Sub Bagian Tata Usaha	Seksi dan Sub Bagian di PPN Ternate	2020
5.	SKPI Tingkat I	Persyaratan Penerbitan S-CPIB kapal perikanan	Seksi Kesyahbandaran		2020
6.	Aktivasi e-logbook	Sebagai dukungan pengawasan SDI	Seksi Kesyahbandaran		2020
7.	Pojok Pendanaan	Fasilitasi akses pendanaan usaha nelayan melalui lembaga keuangan	Seksi Operasional Pelabuhan	Lembaga keuangan (Perbankan dan non perbankan)	2020
8.	Penerapan PKL	Sosialisasi dan Fasilitasi PKL	Seksi Kesyahbandaran	Stakeholder	2020
9.	Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan	Sosialisasi Revisi Peraturan MKP Tentang SHTI	Seksi Kesyahbandaran	Direktorat Pelabuhan Perikanan, Stakeholder	2020
10.	Penerapan ISO 9001:2015	Kaji ulang manajemen mutu ISO 9001:2015 dan Audit Internal	Sub Bagian Tata Usaha	Konsultan ISO	2020
11.	Sekretariat LPP WPPNRI 717	Implementasi kegiatan koordinasi dan operasional Sekretariat WPPNRI 717	Sub Bagian Tata Usaha		2020
12.	Pencanangan Zona Integritas	Sebagai pendukung Reformasi Birokrasi DJPT	Sub Bagian Tata Usaha		2021

12.	Review WKOPP	Implementasi Rencana Zonasi sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2018	Seksi Operasional Pelabuhan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota, KSOP	2021
13.	Dokumen Amdal	Penyesuaian terhadap perkembangan pelabuhan perikanan	Seksi TKPU	Dinas Lingkungan Hidup, KSOP, Dinas PU, Dinas Kelautan dan Perikanan, BAPPEDA	2021
14.	Rewiew Master Plan	Penataan dan Pengembangan PPN Ternate	Seksi TKPU	Dinas PU, KSOP	2024